KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TRIWULAN III

2024

Kata Pengantar

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin) Triwulan III Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai laporan atas realisasi dan capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Pusdatin serta memberikan informasi kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusdatin untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 4 Indikator Kinerja yang pengukurannya dilakukan secara triwulanan, yaitu Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen; Survei Kepuasan Masyarakat KKP; Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin; dan Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin dan terdapat 2 indikator yang pengukurannya dilakukan secara tahunan, namun capaian sudah tercapai pada Triwulan III, yaitu Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP dan Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP. Seluruh Indikator ini telah mencapai target Triwulan III sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan III Tahun 2024 ini, dan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai evaluasi kinerja untuk triwulan berikutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, September 2024
Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan

Aulia Riza Farhan, S.T., M.Sci.Tech., Ph.D.
NIP. 197208122001121002

Ringkasan Eksekutif

Pusdatin dalam rencana kinerjanya memfokuskan dukungan pada kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Pada tahun 2024 Pusdatin memiliki 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja terdapat 4 (empat) indikator yang capaiannya dinilai secara triwulan, 2 (dua) indikator yang dinilai secara semesteran, dan 15 (lima belas) indikator yang dinilai secara tahunan.

Berdasarkan *Dashboard* aplikasi Kinerjaku (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Pusdatin Triwulan II Tahun 2024 ditunjukkan dengan Skor Kinerja sebesar 116,17%. Hasil analisis terhadap IKU yang telah dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2024, dapat disampaikan sebagai berikut :

Table 1. Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target	Realisasi TW III	Capaian (%)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94	133,33	141.84
		6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76	80,78	106,29
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,50	3,40	136
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30	91,54	103,67
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80	100	125
		20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94	133,33	141.84

Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 30 September tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp 129.214.041.000,-** telah direalisasikan senilai **Rp 29.402.561.244,-** dengan persentase realisasi anggaran adalah senilai **28,85%,** dengan sisa anggaran senilai **Rp 74.013.524.281,-** Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjustment* (AA) dan Blokir kode 2 (kurang Data Dukung) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai **Rp 26.198.710.000,-** atau sebesar **20,28%** dari total pagu anggaran.

Sebagai upaya perbaikan kinerja ke depan, seluruh penanggung jawab indikator kinerja dan Tim SAKIP Pusdatin akan melakukan evaluasi capaian secara berkala serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja pada triwulan selanjutnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 3
1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin 3
1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin 8
1.2.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data, Statistik dan Informasi 9
1.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional 11
1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja 12
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 14
2.1 Sasaran Kegiatan 14
2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 15
2.3 Program dan Kegiatan 16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA 18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 18
3.2.Evaluasi dan Analisis Kinerja 20
3.2.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan 21
3.2.2 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal 26
3.2.3 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi 30
3.2.4 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim 31
3.2.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP 33
3.2.6 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP 35
3.2.7 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi 40

3.2.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP 41
3.2.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan 46
3.2.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP 48
3.2.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP 50
3.2.12 Indeks Pelayanan Publik KKP 52
3.2.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP 55
3.2.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP 58
3.2.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin 62
3.2.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP 64
3.2.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin 66
3.2.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin 68
3.2.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin 74
3.2.20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin 76
3.2.21 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin 77
3.3 Realisasi Anggaran 78
BAB 4 PENUTUP 81
4.1 Kesimpulan 81
4.2 Rencana Tindak Lanjut 82
LAMPIRAN 83

Daftar Tabel

Table 1. Capaian Kinerja Pusdatin Triwulan III Tahun 2024 ii
Table 2. Tim Kerja Lingkup Pusdatin Tahun 2024 4
Table 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin 9
Table 4. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai Pusdatin 9
Table 5. Distribusi Pegawai Pusdatin 10
Table 6. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin 11
Table 7. Target Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2024 15
Table 8. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Tahun 2024 19
Table 9. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP 22
Table 10. Capaian Kusuka Input Penyuluh Triwulan III Tahun 2022 – 2024 23
Table 11. Sebaran Input Baru Kusuka Triwulan III Tahun 2024 Berdasarkan Satminkal 24
Table 12. Sebaran Penyuluh Perikanan yang Melakukan Input Baru Kusuka Triwulan III Tahun 2024 Berdasarkan Satminkal 25
Table 13. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Setjen Triwulan III Tahun 2024 27
Table 14. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi 30
Table 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi 32
Table 16. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Triwulan III Tahun 2024 34
Table 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik 36
Table 18. Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024 36
Table 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial 41
Table 20. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP 42
Table 21. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan 47
Table 22. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP 49
Table 23. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP 51
Table 24. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Triwulan II Tahun 2024 53
Table 25. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP 56
Table 26. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP 59
Table 27. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin 63
Table 28. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP 65
Table 29. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK 67
Table 30. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Triwulan II Tahun 2024 72
Table 31. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan 75

Table 32. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Pusdatin Triwulan III Tahun 2024 76
Table 33. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan III Tahun 2024 78
Table 34. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Tahun 2024 79

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organissasi 8
Gambar 2. Distribusi Pegawai Lingkup Pusdatin 11
Gambar 3. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan III 18
Gambar 4. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan III 19
Gambar 5. Validasi Nasional Semester I 2024 26
Gambar 6. Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan per Satuan Kerja Setjen Triwulan III Tahun 2024 28
Gambar 7. Pengukuran Capaian Indikator MP Triwulan III Tahun 2024 29
Gambar 8. Sosialisasi aplikasi platform visualization and recognition 31
Gambar 9. Rapat Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim 33
Gambar 10. Pengisian SIA SPBE V2 dengan Kementerian PAN dan RB 35
Gambar 11. Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP 2024 40
Gambar 12. Aspek Pengukuran dan Tingkat Kematangan Keamanan Siber 42
Gambar 13. Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024 43
Gambar 14. Hasil Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024 44
Gambar 15. Rapat Koordinasi Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan 48
Gambar 16. Koordinasi Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP 52
Gambar 17. Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenPANRB di BPSPL Pontianak 54
Gambar 18. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lokus UPP oleh Ombudsman RI 56
Gambar 19. Validasi SKM TW III 61
Gambar 20. Peningkatan kompetensi Admin SKM 61
Gambar 21. Dashboard rekapitulasi pelaporan SKM 62
Gambar 22. Rapat Penyiapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Monitoring Kinerja Individu 64
Gambar 23. Rapat Koordinasi Progsun Struktur Basis Data Penyakit Ikan dan Data Induk Penyakit Ikan 66
Gambar 24. Rapat Penyelesaian Temuan BPK 68
Gambar 25. Koordinasi Kolaborasi dan Evaluasi JF Prakom, Statistisi & Surta lingkup KKP 74
Gambar 26. Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan per Satuan Kerja Pusdatin Triwulan III Tahun 2024 77
Gambar 27. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Rincian Ouput 80

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Pusat Data, Statistik, dan Informasi (Pusdatin) Triwulan III Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu dalam pengelolaan kinerja, merujuk juga pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pusdatin sebagai institusi yang mempunyai tugas memberikan layanan tentang informasi kelautan dan perikanan, dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan serta dibutuhkan oleh *stakeholders,* serta memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, bahwa pelaksanaan Transformasi Digital RPJMN 2020–2024 meliputi:

1. Peningkatan kemandirian industri dan SDM TIK dalam negeri, melalui **Harmonisasi kebijakan dan regulasi** untuk mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri; **Peningkatan kapasitas SDM TIK** yang tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; **Peningkatan literasi digital** masyarakat;
2. Adopsi pemanfaatan teknologi global (*Big Data*, IoT, AI, dan lain-lain) bersifat lintas sektor dalam proses perencanaan, pemantauan, maupun pelaksanaan kinerja, melalui: **pelaksanaan Satu Data** dalam rangka pemanfaatan data yang saling interoperabilitas, terstandar dan dapat dibagipakaikan serta mendukung pelaksanaan operasional ***command center*** dan implementasi ***collaboration office***.

Untuk mendukung pelaksanaan transformasi digital sesuai dengan RPJMN, implementasi tersebut ditindaklanjuti dalam arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, yang meliputi :

1. Tujuan pembangunan berkelanjutan;
2. Gender;
3. Modal sosial budaya; dan
4. Transformasi digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerjasama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis *web* (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perikanan Indonesia, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat dioperasionalkan secara terintegrasi dengan *existing system* yang ada di KKP saat ini. Pengembangan sistem ini menjadi langkah besar KKP dalam mengimplementasikan program percepatan pelaksanaan penangkapan ikan terukur dan pemantauan kegiatan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Sistem ini akan diimplementasikan dalam sarana Pusat Kontrol Maritim (*Command Center*) yang dioperasionalkan oleh KKP, dimana kegiatan ini merupakan Program Nasional dan kegiatan prioritas Pusdatin.

Laporan Kinerja Pusdatin Triwulan III Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Akuntabilitas Kinerja Pusdatin tahun 2024 yang mencakup pencapaian tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta kebijakan yang ditetapkan.

1.2 Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusdatin

Sesuai dengan Surat Tugas Kapusdatin Nomor B.2260/SJ.7/KP.440/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, dan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka telah ditetapkan Pusdatin memiliki 7 (tujuh) Tim Kerja, dengan uraian fungsi sebagaimana tabel berikut :

Table 2. Tim Kerja Lingkup Pusdatin Tahun 2024

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
1.	Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Atap	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Melakukan penyiapan, pengumpulan, penyusunan dan pendampingan serta pelaporan pelayanan publik.
		Nilai Mutu Pelayanan Unit Kerja PTSA	a. Melakukan koordinasi penyiapan, pengumpulan dan penyusunan dokumen dalam pengelolaan fasilitas pelayanan terpadu satu atau di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. Melakukan koordinasi penyiapan, pengumpulan, penyusunan dokumen dalam Pengelolaan Nilai Mutu Pelayanan Publik; c. Melakukan koordinasi penyiapan, pengumpulan dan penyusunan dokumen Zona Integritas WBK/WBBM.
2.	Pengelolaan Data dan Statistik	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan	a. Melakukan koordinasi, perencanaan, dan standardisasi pengelompokan data dan metodologi statistik kelautan dan perikanan; b. Melakukan koordinasi, pengumpulan, pengolahan, dan pemeriksaan data kelautan dan perikanan; c. Melakukan koordinasi, analisis, penyajian, penyebarluasan data kelautan dan perikanan; d. Melakukan monitoring dan evaluasi data kelautan dan perikanan.
		Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan	a. Melakukan pengelolaan data kelautan dan perikanan mendukung implementasi Satu Data Indonesia; b. Melaksanakan tugas sebagai Walidata Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3.	Standardisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP dan Aplikasi SIstem Informasi	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP	a. Melakukan koordinasi dan penyiapan bahan evaluasi SPBE di lingkungan KKP; b. Koordinasi pelaksanaan clearance anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait; c. Monitoring dan evaluasi implementasi arsitektur SPBE di lingkungan KKP; d. Penyusunan kebijakan tata kelola SPBE di lingkungan KKP.

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
		Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan koordinasi dalam pemenuhan Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP; b. Monitoring dan evaluasi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan KKP.
		Indeks Layanan Sistem dan Teknologi Informasi	a. Melakukan pengelolaan layanan surat elektronik (e-mail) KKP; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka evaluasi layanan aplikasi; c. Melakukan pengintegrasian dan pemeliharaan aplikasi; d. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka sistem perizinan berusaha.
		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam pemenuhan Persentase Unit Kerja Pusdatin yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan dokumen standardisasi aplikasi.
4.	Pengelolaan Kendali Maritim	Persentase Layanan Sistem Informasi Pengelola Kendali Maritim	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi merupakan sistem untuk menyediakan data dan informasi yang terpusat untuk dapat menggambarkan situasi secara *real time*; b. Melakukan pengelolaan data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; c. Melakukan visualisasi data dan informasi bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan hasil kajian dan analisis data untuk kebutuhan *decission support system*; d. Melakukan pengelolaan operasional dan pemeliharaan aset *command center* dan komputasi lingkup KKP; e. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
			persentase layanan sistem informasi pengelolaan kendali maritim.
		Persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan; b. Melakukan penyediaan sistem yang terintegrasi dan infrastruktur sistem satelit nano untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan fungsi kontrol, monitoring, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyediaan transponder dan sistem monitoring situasi maritim; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan integrasi dari beberapa sistem informasi dan unit kerja eselon I yang telah ada, serta data citra berbasis satelit yang dimiliki KKP.
5.	Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi	a. Melakukan kegiatan keamanan siber dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi; b. Melakukan kegiatan pengelolaan *bandwidth* dan infrastruktur jaringan KKP pusat.
6.	Hukum, Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Kinerja	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusdatin	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan laporan kinerja, laporan tahunan, SAKIP.
		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pengelolaan data statistik dan informasi KP.
		Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan pengelolaan layanan kearsipan dan persuratan.

No.	Nama Tim Kerja	Indikator Kinerja	Uraian Fungsi
7.	Program, Anggaran dan PHLN	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan PIPK.
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin	Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin.
		Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin	a. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka pemenuhan persentase realisasi penyerapan anggaran Pusdatin; b. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan anggaran APBN/Pinjaman Hibah Luar Negeri; c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan terkait pengadaan barang dan jasa; d. Penyiapan laporan keuangan dan BMN, pencatatan BMN.

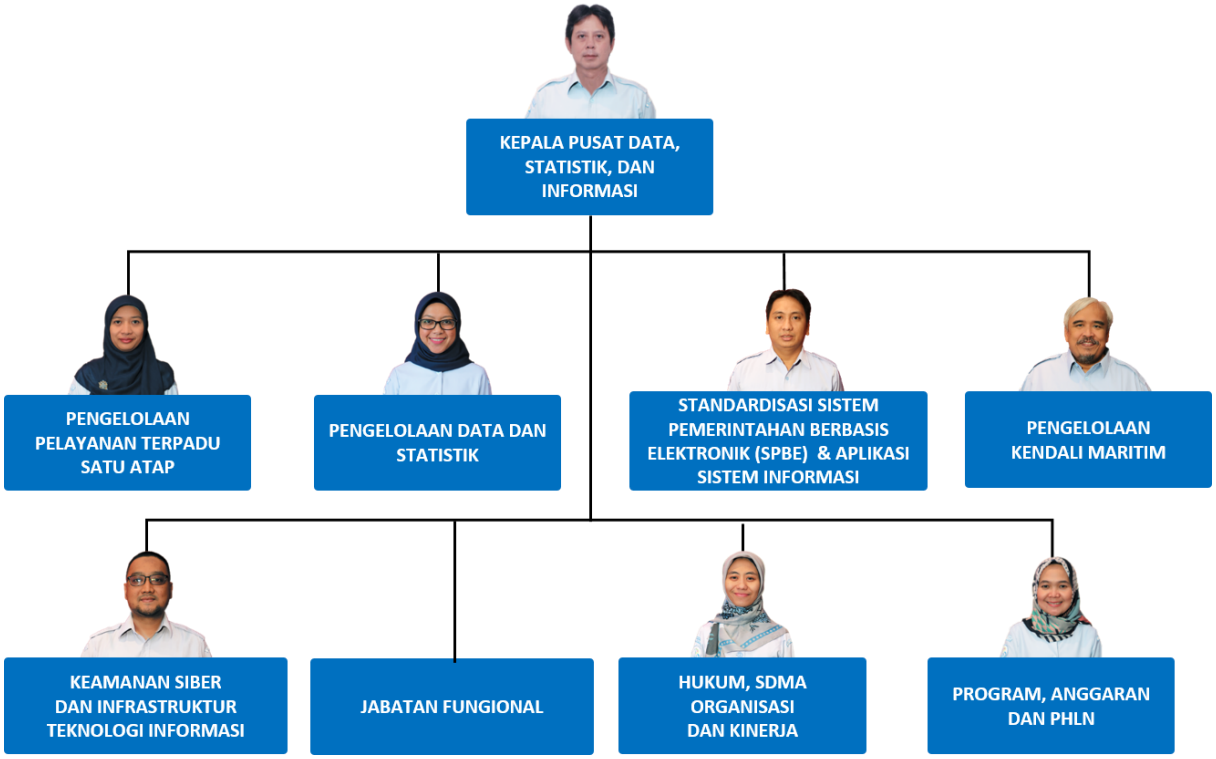

Gambar 1. Struktur Organissasi

1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pusdatin

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusdatin menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan data dan statistik, pengembangan aplikasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
b. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, pengolahan, analisis, dan bimbingan teknis data dan statistik kelautan dan perikanan;
c. koordinasi penyusunan, perencanaan, standardisasi, perancangan, pengembangan, bimbingan teknis, integrasi, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi;

d. koordinasi penyusunan, perencanaan, perancangan, pengembangan, standardisasi, bimbingan teknis, pengintegrasian, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi;
e. pengelolaan aplikasi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
f. koordinasi perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan publik;
g. koordinasi standardisasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
h. pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah pembinaan Pusdatin; dan
i. pelaksanaan urusan administrasi Pusdatin.

1.2.3 Sumber Daya Manusia Pusat Data, Statistik dan Informasi

Dalam rangka mengemban tugas, Pusdatin didukung oleh 99 orang pegawai yang terdiri dari 77 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 11 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dengan perincian sebagai berikut:

Table 3. Jumlah Sumber Daya Manusia Pusdatin

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Eselon II	1
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	71
3.	Jabatan Fungsional Umum	16
4.	PPNPN	11
Total		**99**

Jika dilihat dari tingkat pendidikan pegawai ASN di Pusdatin mempunyai latar belakang pendidikan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Table 4. Sebaran Jenjang Pendidikan Pegawai Pusdatin

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	S3	3
2.	S2	19

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
3.	S1	55
4.	D3	33
5.	D1	1
6.	SLTA	7
Jumlah		**88**

Jika dilihat dari golongan ruang, terdapat 13 orang golongan IV, 69 orang golongan III, dan 6 orang golongan II. Sedangkan berdasarkan gender, perbandingan antara pegawai Laki-laki sebanyak 49 orang dan Perempuan sebanyak 39 orang. Distribusi aparatur Pusdatin baik Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) sesuai Kelompok adalah sebagai berikut :

Table 5. Distribusi Pegawai Pusdatin

No.	Tim Kerja	Status Kepegawaian		
		PNS	PPPK	PPNPN
1.	Sistem Pelayanan Terpadu Satu Atap	6	1	0
2.	Data dan Informasi	17	4	2
3.	Standarisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aplikasi Sistem Informasi	17	1	1
4.	Pusat Kontrol Maritim	16	1	0
5.	Keamanan Siber dan Infrastruktur Teknologi Informasi	8	1	3
6.	Hukum, SDMA Organisasi dan Kinerja	5	1	4
7.	Program, Anggaran dan PHLN	7	2	1

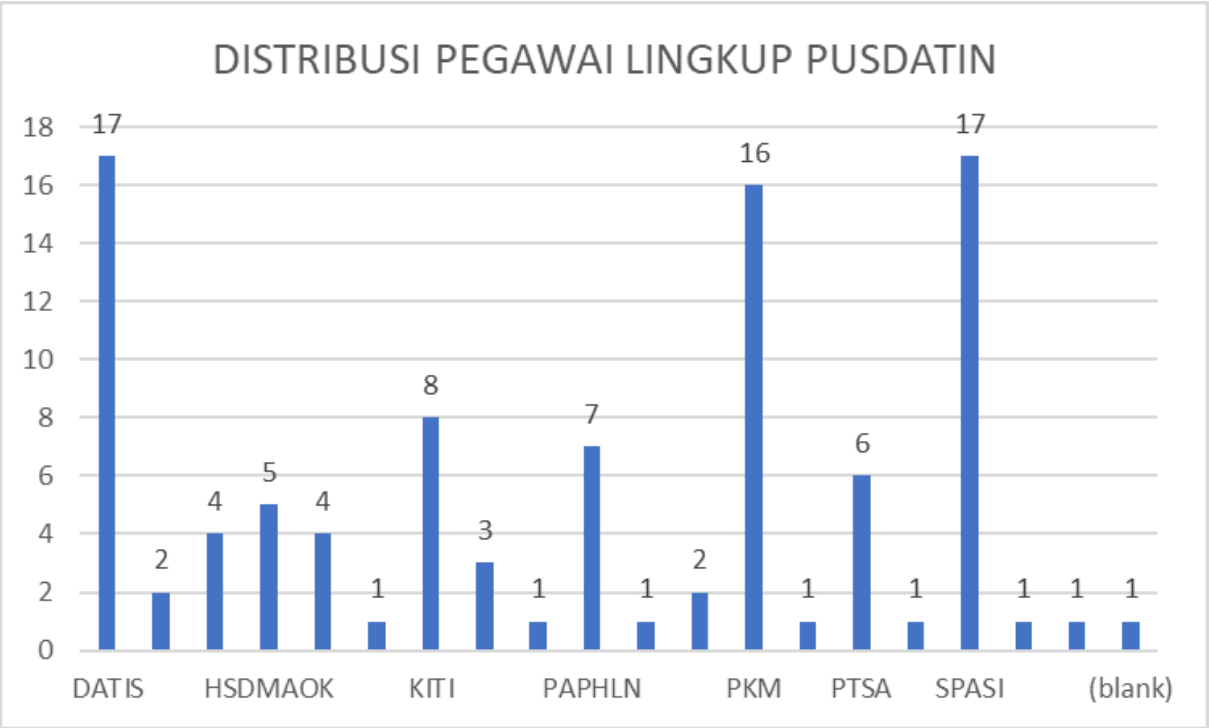

Gambar 2. Distribusi Pegawai Lingkup Pusdatin

1.2.4 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Pusdatin mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada Unit Kerja Pusdatin terdiri atas Pranata Komputer, Statistisi, Analis Kebijakan, Surveyor Pemetaan, Perencana, Analis Pengelola Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Arsiparis, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut jumlah Pejabat Fungsional Tertentu di Pusdatin, sampai dengan 31 Maret 2024.

Table 6. Jumlah Pejabat Fungsional Pusdatin

No.	Jenjang Jabatan Fungsional Lingkup Pusdatin	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)				
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Terampil
1.	Pranata Komputer	7	12	21	1	2
2.	Statistisi	6	2	10		
3.	Perencana	1	1			
5.	Analis Kebijakan		1	1		

No.	Jenjang Jabatan Fungsional Lingkup Pusdatin	Jumlah Sebaran Jabfung (orang)				
		Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pertama	Mahir	Terampil
6.	Analis Pengelola Keuangan APBN		1			
7.	Pranata Keuangan APBN					1
8.	Surveyor Pemetaan	2		2		1
9.	Analis SDM			1		
10.	Arsiparis				1	
11.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa					
	Total	**16**	**17**	**35**	**2**	**4**

Catatan : Termasuk Pejabat Transformasi dan PPPK

1.3 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 disusun untuk menginformasikan capaian kinerja Pusdatin berdasarkan rencana kerja yang sudah ditetapkan pada penetapan kinerja tahun 2024 dan sesuai dengan target kinerja tahunan sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan membandingkan antara capaian kinerja (*performance result*) tahun 2023 dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan, maka akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*). Dari hasil analisis terhadap celah kinerja tersebut, dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024 Pusdatin adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, organisasi dan personalia, sistematika penyajian.
2. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan atau ikhtisar penjanjian kinerja Pusdatin yang telah dicapai dalam satu tahun.
3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

   Hasil capaian dilengkapi dengan analisa:

   a. Capaian Kinerja Organisasi
      - Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
      - Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan periode yang sama tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya (dapat dilihat di SPAN/PMK 249);
- Analisa program/kinerja yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Pusdatin sesuai Dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah salah satu bagian dari perjanjian kinerja yang merupakan salah satu alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan kegiatan dan dapat digunakan sebagai fokus perbaikan kinerja dimasa depan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu sehingga mudah dalam pengukurannya. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Adapun tujuan Pusdatin adalah sebagai berikut :

1. mewujudkan penyajian data, statistik dan pelayanan informasi secara berkesinambungan;
2. mewujudkan sarana jaringan Sistem Informasi Manajemen Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pelayanan alur data maupun informasi secara tepat, cepat dan efisien;
3. mewujudkan sistem informasi secara terpadu dengan mengintegrasikan berbagai sumber informasi lingkup kementerian;
4. terciptanya SDM yang handal dalam teknologi informasi dan data statistik; dan
5. terwujudnya data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir guna mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka pada Tahun 2024 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan”, dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana

tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Pada masing-masing sasaran ditetapkan indikator yang dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

2.2 Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

Pada tahun 2024 Pusdatin mempunyai 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Bidang Pengelolaan Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan", dan "Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi" dan diuraikan ke dalam 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama.

Penetapan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon I bagi PK pejabat Eselon II serta oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bagi PK pejabat Eselon I. PK Pusatin Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Table 7. Target Indikator Kinerja Utama Pusdatin Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2024
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94
		3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		4.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76
		5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05
		6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76
		7.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	76

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2024
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,75
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100
		18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80
		20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94
		21.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

2.3 Program dan Kegiatan

Pusdatin merupakan unit Eselon II yang berada di bawah Sekretariat Jenderal KKP, melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan, yaitu “Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”. Sejak Tahun Anggaran 2023, telah diimplementasikan kebijakan 1 (satu) DIPA pada masing-masing unit kerja Eselon I lingkup KKP, sedangkan DIPA Sekretariat Jenderal KKP dikelola di Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Pusdatin yang merupakan unit kerja dibawah Sekretariat Jenderal melaksanakan empat kegiatan dalam Rincian *Output* (RO). RO

tersebut akan memenuhi Sasaran Kegiatan, yaitu “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan” dan “Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi”.

Untuk mencapai sasaran tersebut dengan sejumlah target indikator sebagaimana tabel di atas, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2024 senilai **Rp 129.214.041.000,-.**

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tersebut di atas dijabarkan kepada target kinerja tahunan dan triwulanan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada tahun 2024 yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Pusdatin Triwulanan dan Tahunan.

BAB 3
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KKP.

Analisis capaian kinerja tahun 2024 mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pusdatin, antara lain melaksanakan penyediaan data dan statistik, pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas keamanan infrastruktur teknologi informasi di bidang kelautan dan perikanan, serta pelayanan ketatausahaan dan perizinan terpadu.

Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Pusat Data, Statistik dan Informasi menggunakan Sistem Aplikasi Perjanjian Kinerja *online* yaitu *www.kinerjaku.kkp.go.id*. Proses penghitungan kinerja menggunakan manual IKU, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Adapun capaian kinerja IKU Pusdatin periode Triwulan III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku dengan nilai 116,17%, dapat dilihat pada gambar berikut.

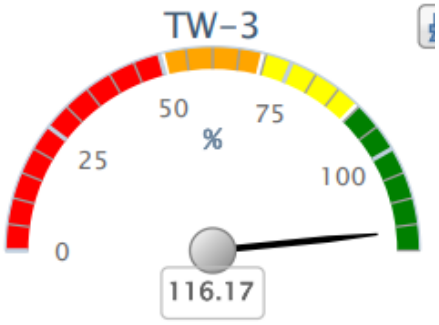

Gambar 3. Skor Kinerja Pusdatin Triwulan III

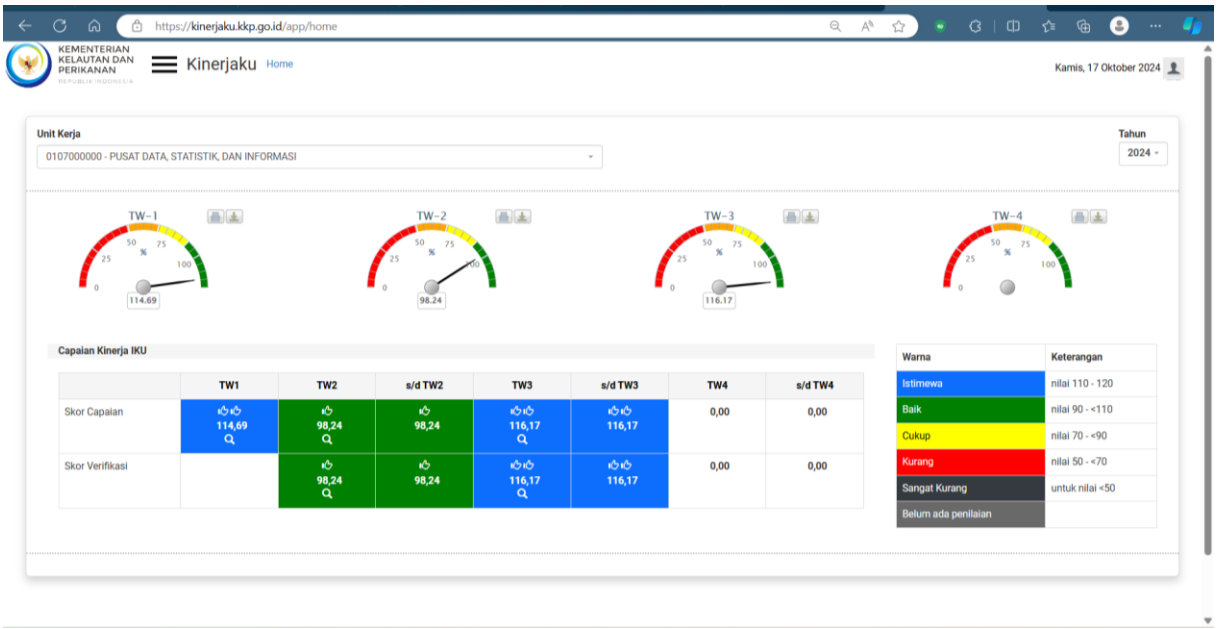

Gambar 4. Dashboard Skor Kinerja Pusdatin Triwulan III

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pencapaian sasaran kegiatan Pusdatin dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini :

Table 8. Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Pusdatin Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi TW III	Capaian (%)
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91		
		2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94	133,33	141,84
		3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5		
		4.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76		
		5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05		
		6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76		
		7.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	76		

Sasaran Kegiatan		Uraian Indikator Kinerja		Target Tahun 2024	Realisasi TW III	Capaian (%)
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5	3,40	136
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70		
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3		
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,75		
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59		
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85		
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30	91,54	103,67
2.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84		
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100	0	0
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100		
		18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85	87,09	108,86
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80	100	125
		20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94	133,33	141,84
		21.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95		

3.2.Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dalam rangka menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan. Realisasi dan capaian kinerja Pusdatin Triwulan III tahun 2024 berdasarkan PK yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

3.2.1 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data (TKPD) Kelautan dan Perikanan bertujuan untuk melihat tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Sesditjen Eselon II terkait yang menangani data produksi perikanan. Terdapat 3 (tiga) variabel perhitungan yang digunakan untuk evaluasi TKPD, yaitu :

1. Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (Variabel X_1), Bobot Nilai 30%

   Dihitung berdasarkan jumlah KUSUKA yang telah valid pada setiap Unit Kerja Eselon I pada laman Satu Data KKP, dengan rumus :

   ∑ KUSUKA = (Jumlah Pelaku Usaha KP yang telah Valid / Total Target) x 100

2. Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (Variabel X_2), Bobot Nilai 40%

   Merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi terhadap sampling yang telah ditetapkan pada tahun berjalan serta capaian atas Validasi Nasional pada aplikasi validasi nasional *desktop* dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

3. Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (Variabel X_3), Bobot Nilai 30%

   Merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data geospasial yang telah dilakukan oleh Unit Data Eselon I. Hasil pengukuran hasil capaian sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon I.

   Penilaian dihitung terhadap capaian kegiatan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan dengan rumus :

   Nilai per eselon 1 = (jumlah rencana aksi yang diselesaikan/total kegiatan berdasarkan rencana aksi) x 100

   Sehingga perhitungan persentase TKPD Kelautan dan Perikanan, dengan rumus :

Persentase TKPD = Variabel X_1 + Variabel X_2 + Variabel X_3

Adapun Kriteria penilaian sebagai berikut :

1. Tidak Patuh, jika nilai TKPD 0% - 25%
2. Cukup Patuh, jika nilai TKPD 26% - 50%
3. Patuh, jika nilai TKPD 51% - 75%
4. Sangat Patuh, jika nilai TKPD 76% - 100%

Table 9. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Pusat, Data, Statistik, dan Informasi Kelautan dan Perikanan											
Nama IKU	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP (%)											
REALISASI					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-TW III 2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
65,89	88,50	81,40	87,08	99.01	-	-	-	-	91	-	91	-

Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data KP merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan III tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU TKPD Kelautan dan Perikanan pada Triwulan III Tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Eselon I dan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk melakukan validasi tingkat provinsi, sebagai bahan Validasi Nasional Semester I Tahun 2024;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi Capaian Pendataan Kusuka oleh Penyuluh Perikanan Triwulan III – 2024, dengan hasil:

    a. Pendataan Kusuka dilakukan oleh enumerator (penyuluh perikanan dan petugas dinas kelautan dan perikanan di provinsi maupun kabupaten/kota) serta pendaftaran mandiri oleh pelaku usaha.

    b. Dalam pendataan Kusuka, penyuluh perikanan memiliki peranan penting untuk mendukung keberhasilan

pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya melalui pendampingan pelaku utama dan usaha KP di lapangan.

c. Monitoring dan evaluasi pendataan Kusuka dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk mengetahui progres dan efektivitas dari pendataan Kusuka yang dilakukan oleh penyuluh perikanan.

d. Berdasarkan data pada *web* statistik.kkp.go.id tanggal 1 Oktober 2024, total rekapitulasi profesi utama (nelayan, pemasar antar pelabuhan, pemasar ikan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan petambak garam) mencapai 1.649.528. Capaian pendataan kusuka pelaku usaha valid tertinggi diantaranya: Pengolah Ikan dengan capaian sebesar 138,49%, Pemasar Antar Pelabuhan dengan capaian sebesar 133,72%, dan Petambak Garam dengan capaian sebesar 84,67%.

e. Berdasarkan data capaian KUSUKA triwulan III tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024, terdapat 46.008 inputan baru dan 54.624 pemutakhiran KUSUKA berdasarkan *updated by*. Capain Kusuka input penyuluh triwulan III tahun 2022 ditunjukkan pada tabel 10.

Table 10. Capaian Kusuka Input Penyuluh Triwulan III Tahun 2022 – 2024

Satminkal	2024									
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Total
BBRBLPP Gondol	728	1.347	995	785	1.126	640	661	1.058	1.308	8.648
BPPP Ambon	337	585	614	296	527	488	694	402	329	4.272
BPPP Banyuwangi	871	1.309	1.547	745	1.276	1.851	1.725	1.822	3.982	15.128
BPPP Bitung	279	305	241	164	327	222	384	251	131	2.304
BPPP Medan	653	774	838	496	1.063	910	755	675	947	7.111
BPPP Tegal	1.484	1.534	1.298	606	1.742	1.820	2.210	2.109	3.949	16.752
BRPBAPPP Maros	591	773	647	776	1.197	822	777	725	852	7.160
BRPBATPP Bogor	797	1.477	1.508	834	1.640	1.136	964	1.245	1.361	10.962
BRPPUPP Palembang	738	856	888	407	1.194	1.009	1.474	1.992	2.036	10.594
Grand Total	**6.478**	**8.960**	**8.576**	**5.109**	**10.092**	**8.898**	**9.644**	**10.279**	**14.895**	**82.931**

Berdasarkan tabel 1, rata-rata pertumbuhan *input created by* dan *username input* pada tahun 2022 masing-masing sebesar 17,26% dan

9,86%. Rata-rata pertumbuhan *input created by* dan *username input* pada tahun 2023 masing- masing sebesar 29,80% dan 18,41%. Rata-rata pertumbuhan *input created by* dan *username input* pada tahun 2024 masing-masing sebesar 17,40% dan 4,90% sehingga dapat disimpulkan rata-rata pertumbuhan input mengalami kenaikan pada tahun 2023 namun pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan *input*. Sebaran input baru Kusuka Triwulan III tahun 2024 berdasarkan Satminkal ditunjukkan dalam Tabel 11.

Table 11. Sebaran Input Baru Kusuka Triwulan III Tahun 2024 Berdasarkan Satminkal

Satminkal	2024									
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Total
BBRBLPP Gondol	728	1.347	995	785	1.126	640	661	1.058	1.308	8.648
BPPP Ambon	337	585	614	296	527	488	694	402	329	4.272
BPPP Banyuwangi	871	1.309	1.547	745	1.276	1.851	1.725	1.822	3.982	15.128
BPPP Bitung	279	305	241	164	327	222	384	251	131	2.304
BPPP Medan	653	774	838	496	1.063	910	755	675	947	7.111
BPPP Tegal	1.484	1.534	1.298	606	1.742	1.820	2.210	2.109	3.949	16.752
BRPBAPPP Maros	591	773	647	776	1.197	822	777	725	852	7.160
BRPBATPP Bogor	797	1.477	1.508	834	1.640	1.136	964	1.245	1.361	10.962
BRPPUPP Palembang	738	856	888	407	1.194	1.009	1.474	1.992	2.036	10.594
Grand Total	**6.478**	**8.960**	**8.576**	**5.109**	**10.092**	**8.898**	**9.644**	**10.279**	**14.895**	**82.931**

Berdasarkan tabel 11, total input baru kusuka triwulan III sebesar 82.931 inputan. 3 satminkal dengan perolehan input baru tertinggi, diantaranya: BPPP Tegal sebesar 16.752 inputan, BPPP Banyuwangi sebesar 15.128 inputan, dan BRPBATPP Bogor sebesar 10.962 inputan. Sebaran Penyuluh Perikanan yang melakukan Input Baru Kusuka Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan Satminkal ditunjukkan dalam Tabel 12.

Table 12. Sebaran Penyuluh Perikanan yang Melakukan Input Baru Kusuka Triwulan III Tahun 2024 Berdasarkan Satminkal

Satminkal	2024									
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Total
BBRBLPP Gondol	79	108	105	112	123	88	95	107	111	239
BPPP Ambon	52	65	69	56	77	63	73	66	55	127
BPPP Banyuwangi	100	132	153	97	148	152	155	153	173	363
BPPP Bitung	33	42	41	39	40	35	33	37	32	104
BPPP Medan	86	98	106	97	150	108	120	99	93	309
BPPP Tegal	106	133	136	99	162	146	145	132	136	307
BRPBAPPP Maros	88	118	112	121	123	95	117	103	100	269
BRPBATPP Bogor	76	98	120	110	144	107	113	122	114	256
BRPPUPP Palembang	77	97	110	69	116	93	88	99	100	288
Grand Total	**697**	**891**	**952**	**800**	**####**	**887**	**939**	**918**	**914**	**2.262**

Berdasarkan tabel 3, total penyuluh yang telah melakukan input baru kusuka triwulan III sebesar 2.262 inputan. 3 satminkal dengan perolehan penyuluh terbanyak yang telah melakukan input baru, diantaranya: BPPP Banyuwangi sebanyak 363 penyuluh, BPPP Medan sebanyak 309 penyuluh, dan BPPP Tegal sebanyak 307 penyuluh.

Hal yang perlu ditindaklanjuti adalah:

a. Pusdatin akan mengirimkan nota dinas penyampaian capaian input KUSUKA triwulan III tahun 2024 oleh penyuluh.
b. Pusdatin, Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Satminkal perlu melakukan pemutakhiran *username* penyuluh yang pindah dan penyuluh yang sudah pensiun.
c. Pusdatin dan Sekretariat BPPSDM perlu koordinasi lebih lanjut terkait sistem informasi penyuluh

3. Telah diselesaikan oleh PT Bagus Harapan Tritunggal menu Rekapitulasi Usaha KP yang telah dipadankan dengan data lainnya yaitu Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Dukcapil dan OSS pada *Dasboard* Kusuka.
4. Terkait *Progress* Pengembangan Aplikasi Satu Data Modul Kusuka, sarana prasarana pelaku usaha lebih dari satu beserta statusnya akan ditampilkan pada *dashboard*.

Kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan Validasi Nasional Semester I pada Bulan Oktober 2024;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Validator Pusat dan Validator Daerah untuk segera memvalidasi data-data yang telah masuk;
3. Penilaian bidang data geospasial lingkup KKP pada Oktober 2024.

Gambar 5. Validasi Nasional Semester I 2024

3.2.2 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Sekretariat Jenderal

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian kegiatan yang memanfaatkan teknologi dan informasi yang digunakan oleh Pemerintah ataupun Swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. IKU ini merupakan indikator yang mengukur pemanfaatan teknologi informasi dengan penilaian aspek keaktifan dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin *upload* keaktifan dan maksimal 4 poin keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Pembobotan yang dimaksud antara lain adalah :

1. Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5HW1 dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5;
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1;
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Cara pengukuran :

1. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Collaboration Office*);
2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :
   a. Penghitungan keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan;
   b. Pengukuran Level I dihitung dengan lingkup pejabat pusat Eselon II;
   c. Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan;
   d. Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing Unit Kerja Eselon I.

   Pengukuran capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Table 13. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Setjen Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**	
Nama IKU	**Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen (%)**	
REALISASI	**2024**	**Renstra 2020-2024**

2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
91,14	96,06	95,59	98,32	112,59	94	133,33	141,84	0	94	141,84	95	140,35

Dari tabel dapat dilihat bahwa realisasi Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 133,33%, yang menunjukan bahwa capaian sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Hal ini dapat dicapai karena sebagian besar Pejabat di Level I dan II aktif dalam melakukan *sharing* informasi capaian kinerja masing-masing unit kerja. Realisasi Manajemen Pengetahuan pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 133,33, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan III Tahun 2024 kenaikannya adalah 0%. Dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa capaian semua Unit Kerja lingkup Setjen adalah sama, yaitu 133,33%.

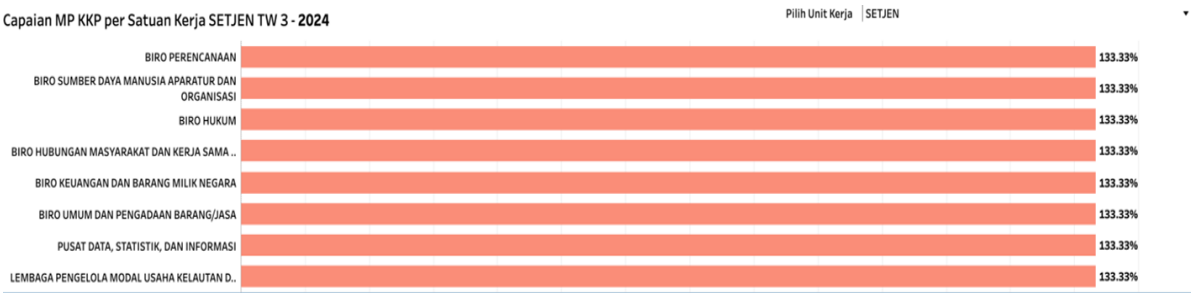

Gambar 6. Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan per Satuan Kerja Setjen Triwulan III Tahun 2024

Kegiatan-kegiatan dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen adalah :

1. mengintegrasikan proses bisnis seluruh layanan yang ada di KKP agar dapat berjalan lebih efisien dan optimal, telah dilakukan pengembangan menu pada *Collaboration Office* yaitu menu kearsipan dan nilai IP ASN dari epegawai KKP;
2. pemenuhan data dukung penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dilaksanakan penginputan Sistem Informasi

Arsitektur SPBE (SIA SPBE) V2, yang dievaluasi oleh Kementerian PAN RB;

3. menyampaikan capaian sementara nilai MP melalui Nota dinas dan Memorandum kepada seluruh unit kerja;
4. telah tersedia menu publikasi pada *website* KKP untuk akuntabilitas kinerja baik pada level KKP maupun unit kerja eselon 1, yang terdiri dari: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Diharapkan Pegawai lingkup Setjen dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan menu tersebut;

Gambar 7. Pengukuran Capaian Indikator MP Triwulan III Tahun 2024

Tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan *Portal Collaboration Office*;
2. Evaluasi Penginputan SIA SPBE V2;
3. Forum Kolaborasi Sistem Informasi;
4. Sosialisasi implemetansi Portal di beberapa UPT KKP

3.2.3 Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan penilaian atas layanan aplikasi yang diberikan oleh Pusdatin kepada seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP, baik pusat maupun di unit pelaksana teknis di daerah.

Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada Unit Eselon I di lingkungan KKP. Pengukuran dengan Skala Likert, dengan kriteria hasil sebagai berikut :

Nilai 4,5 – 5 : Memuaskan

Nilai 4 – 4,5 : Sangat Baik

Nilai 3 – 3,9 : Baik

Nilai 2 – 2,9 : Cukup

Nilai < 1,9 : Kurang

Table 14. Target dan Realisasi IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi												
Realisasi						2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024		Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	-	-	-	-	-		3,5	-	3,5	-

IKU Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Sebagai informasi, IKU ini juga baru dilaksanakan tahun 2023.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III untuk mendukung indikator kinerja ini adalah:

1. Mengintegrasikan proses bisnis seluruh layanan yang ada di KKP agar dapat berjalan lebih efisien dan optimal, dengan pengembangan menu pada *Collaboration Office* yaitu menu kearsipan dan nilai IP ASN dari epegawai KKP;

2. untuk mendukung digitilasi terkait penyaluran dana bergulir pengelola modal usaha, telah dilaksanakan *kick off meeting* pembangunan *platform visualization and recognition*, yang hingga saat ini pembangunannya telah selesai 75%;
3. Telah tersedia menu publikasi pada *website* KKP untuk akuntabilitas kinerja baik pada level KKP maupun unit kerja eselon 1, yang terdiri dari: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja;
4. Seiring meningkatnya kebutuhan unit kerja terkait (DJPSDKP, DJPDSPKP, DJPKRL, dan DJPB) terhadap aliran data rencana kebutuhan impor (RKI) untuk KBLI tertentu dari INSW maka telah dilakukan langkah antisipasi dengan cara optimalisasi aplikasi neraca komoditas, baik dengan cara meningkatkan *availability* maupun *security* pada aspek aplikasi/perangkat lunak.

Tindak lanjut pelaksanaan pada triwulan selanjutnya adalah :

1. Pelaksanaan Audit TIK;
2. Sosialisasi implemetansi Portal di beberapa UPT KKP; dan
3. Sosialisasi aplikasi *platform visualization and recognition* terkait penyaluran dana bergulir pengelola modal usaha.

Gambar 8. Sosialisasi aplikasi platform visualization and recognition

3.2.4 Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim

Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (PKM) merupakan penilaian atas kinerja dan implementasi layanan sistem informasi yang diberikan oleh Pusdatin

kepada pimpinan KKP dan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP dalam menyajikan data secara *real time* dalam bentuk *dashboard* pemantauan di dalam ruang *command center*.

Dalam rangka mengevaluasi hasil kinerja Pusdatin sebagai penyedia layanan sistem informasi pada *command center* KKP, maka dibutuhkan survei kepada pengguna atau *user* di Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP maupun K/L yang telah memanfaatkan layanan sistem informasi. Selain itu juga dilakukan penilaian atas capaian rencana aksi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem informasi Pusat Kontrol Maritim selama 1 tahun.

Table 15. Target dan Realisasi IKU Persentase Layanan Sistem Informasi

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**												
Nama IKU	**Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim**												
Realisasi						**2024**				**Renstra 2020-2024**			
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**		**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**
-	-	-	-	-	-	-	-	-		**76**	-	**77**	-

IKU Persentase Layanan Sistem Informasi PKM merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan III Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1.
2. Telah dilakukan Pengembangan fitur analisis pengawasan di IMIP PKM untuk mendukung operasionalisasi pengawasan PSDKP.
3. Telah dilakukan Proses Instalasi *Radar Harvesting System* di Pangkalan PSDKP Benoa kerja sama KKP dan CSIRO untuk *protyping* sistem monitor pergerakan kapal di pelabuhan.
4. Kegiatan Pengembangan *analytic system* untuk *trip segmentation* kapal perikanan VMS dan *Vessel Traffic Control* (VTC) kerja sama KKP dan CSIRO

untuk implementasi *machine learning* model dalam memprediksi *trip segmentation* dan kapal VMS yang akan mendarat di Pelabuhan Perikanan.

Tindak lanjut pelaksanaan pada triwulan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan Digitalisasi Perizinan, akan dilaksanakan beberapa rapat koordinasi bersama *stakeholder* termasuk Eselon I pengampu aplikasi yang terlibat dalam data master kapal, data master perizinan, data KUSUKA, data produksi, data Validasi Nasional dan lainnya.

Gambar 9. Rapat Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim

3.2.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KKP

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikanan layanan kepada pengguna SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diamanatkan kepada seluruh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi SPBE secara berkala. Evaluasi tersebut merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga akan menghasilkan

nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

IKU Indeks SPBE KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan III Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Table 16. Target dan Realisasi IKU Indeks SPBE KKP Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**												
Nama IKU	**Indeks SPBE KKP**												
Realisasi					**2024**				**Renstra 2020-2024**				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**	**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**	
3,57	**4,21**	**2,75**	**3,3**	**3,58**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,05**	**-**	**3,2**	**-**	

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Verifikasi dan validasi lapangan atas Penilaian Mandiri Percepatan Pelaksanaan Berusaha oleh BKPM dengan didampingi oleh masing-masing Unit Eselon I pengampu perizinan KKP;
2. Menyiapkan data dukung penilaian SPBE pada 4 domain, yaitu: Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan;
3. Menyiapkan data dukung penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah dilaksanakan penginputan Sistem Informasi Arsitektur SPBE (SIA SPBE) V2;
4. Melakukan rapat pembahasan domain tata Kelola SPBE;
5. Melakukan Audit TIK di lingkungan KKP;
6. Melakukan pengisian Sistem Informasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SIA SPBE) V2 dengan Unit Eselon I lingkup KKP dengan pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB;
7. Melakukan *review* pengisian SIA SPBE V2 dengan Kementerian PAN dan RB;
8. Melakukan asistensi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

9. Melakukan rapat-rapat pembahasan domain aplikasi dan infrastruktur dengan Unit Eselon I di lingkungan KKP.

Gambar 10. Pengisian SIA SPBE V2 dengan Kementerian PAN dan RB

Tindak lanjut pelaksanaan pada triwulan selanjutnya adalah :

1. Melakukan persiapan penilaian SPBE pada 4 domain, yaitu: Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi arsitektur SPBE di lingkungan KKP;
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan *clearance* anggaran teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan KKP dengan instansi terkait;
4. Penyusunan kebijakan SMKI dan Manajemen SPBE;
5. Pelaksanaan penginputan SIA SPBE.

3.2.6 Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP

Berdasarkan surat dari Kementerian PAN RB Nomor B/51/S.OO.00.05/2024 tanggal 29 Januari 2024, bahwa sebenarnya pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) ditiadakan, dan kegiatan tersebut berganti menjadi Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi (PKRI). Untuk penyelenggaraan KIPP lingkup KKP akan tetap dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan KIPP Tahun 2023 namun akan dibuat perbedaan pada syarat penyelenggaraan inovasi minimal 1 tahun dan tidak harus layanan publik ke masyarakat.

Table 17. Target dan Realisasi IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	-	-	-	82,33	76	80,78	106,29	-1,55	76	106,29	76	106,29	

IKU Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP merupakan Indikator Kinerja yang realisasinya dihitung periode tahunan. Berdasarkan Nota Dinas Pusdatin Nomor 3113/SJ.7/TU.210/VIII/2024 adalah senilai 80,78 dengan rincian sebagai berikut:

Table 18. Capaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024

No.	Eselon I	Jumlah Proposal yang disubmit	Target	Realisasi IKU	Persentase Capaian (%)
1.	DJPKRL	4 Proposal	76	84.26	110.87
2.	DJPT	6 Proposal	76	87.31	114.88
3.	DJPB	14 Proposal	76	76.07	100.10
4.	DJPDSPKP	5 Proposal	76	85.26	112.18
5.	DJPSDKP	8 Proposal	76	81.13	106.75
6.	BPPSDMKP	12 Proposal	76	80.24	105.57
7.	BPPMHKP	12 Proposal	76	80.31	105.68
Total		**61 Proposal**	**76**	**80.78**	**106.30**

Pada tanggal 9 Agustus 2024 telah dilaksanakan Rapat Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dengan terdapat 61 (enam puluh satu) proposal inovasi yang diajukan oleh Eselon I lingkungan KKP dan pengusulan pemberian penghargaan bagi inovasi yang mendapatkan predikat Top 15 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

No.	Eselon I	Nama UPP	Nama Inovasi
1.	DJPT	Balai Besar Penangkapan Ikan	BULIK MANIS IDAMAN NELAYAN (Bubu Lipat Ikan Mantap dan Istimewa Idaman Nelayan)

2.	DJPKRL	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru	KADO SPESIAL (Kawasan Bando Spesifik Konservasi Alam Laut
3.	DJPDSPKP	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikan	INVAPRO KAPE (Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan)
4.	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangka	TERJALA (Integrasi Pelayanan Jasa dan Pengolahan Da
5.	BPPMHKP	Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkal Pinang	JAGA SI CEKATAN (Jejaring Gabungan Reaksi Cepat Kelautan dan Perikanan) Inovasi Non Digital Cepat Vira
6.	DJPT	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang	SELASIH (Sistem Informasi Pelayanan Air Bers
7.	DJPB	Balai Layanan Usaha Prod uksi Perikanan Budidaya Karawang	SiPATIN (Sistem Pelayanan Terintegrasi)
8.	BPPMHKP	Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram	Si Chupang New (Aplikasi Cukup Mudah dan Gampang New
9.	DJPT	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpan dan	SILAUT (Sistem Integrasi Layanan Usaha Terpadu
10.	DPSDKP	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna	UBI KUPAS (Laut Bersih, Kumpul Sampah dan Plastik)
11.	DJPKRL	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang	Taman Karang Piracora
12.	DJPDSPKP	Dit. Pemasaran	KURAS IKAN (Kurasi Produk Perikanan Untuk UMKM Naik Kelas)
13.	BPPSDM	Politeknik KP Sidoarjo	Aplikasi PENTARU: Penerimaan Taruna Baru (Efektif, Efisien, Transpran)
14.	DJPB	BPBAP Takalar	Bibit Rumput Laut Kualitas Unggul (Biru LautKu)
15.	BPPSDM	BDA Sukamandi	Learning Management System Electronic Millenial Learning (E-MILEA)

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melakukan penilaian proposal KIPP yang diterima oleh tim penilai KKP sesuai dengan petunjuk penilaian kementerian PANRB, penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik nomor 23 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
2. Menyampaikan Berita Acara Penilaian dan perhitungan capaian IKU Level I;
3. Memberikan penghargaan kepada Unit kerja yang memperoleh top 15 pada kompetisi inovasi pelayanan publik KKP tahun 2024;
4. Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi oleh Kementerian PANRB, penilaiannya telah selesai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Instansi Pembina Inovasi Terbaik tahun 2024, untuk inovasi yang lolos sampai tahap wawancara adalah inovasi Pugar dari Direktorat Jasa Kelautan;
5. KKP memperoleh predikat sebagai Pembina Terbaik Instansi Pemerintah untuk Pemantauan Berkelanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) Tahun 2024, sesuai dengan Surat Pengumuman Kementerian PAN RB Nomor B/442/PP.00.05/2024 tentang Hasil Penilaian *Desk* Evaluasi Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2024;
6. Penghargaan Adibakti Mina Bahari (AMB) kategori Pelayanan yang akan dilaksanakan pada bulan September. Pada Minggu ke-1 bulan Agustus telah dilakukan penandatanganan Berita Acara hasil verifikasi nilai oleh Tim Penilai yang terdiri dari Pusat Data Statistik dan Informasi, Inspektorat II, Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. Penilaian dilakukan kepada 16 Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang terdiri dari 6 level Utama, 6 level Madya, dan 4 level Pertama;
7. Berdasarkan Berita Acara hasil sidang pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP Tahun 2024 Nomor B.893/SJ/TU.220/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, dari 61 proposal inovasi yang diajukan oleh Eselon I KKP, terdapat Top 15 proposal yang diusulkan untuk diberi penghargaan;
8. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI telah dilaksanakan wawancara pada tanggal 11 s.d 17 Juli 2024, lokus penilaian Ombudsman tahun 2024 adalah Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Direktorat Penataan Ruang Laut, Direktorat Pengelolaan Sumberdaya

Ikan, Direktorat Pemantauan Operasi dan Armada, dan Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen;

9. Pusat Data, Statistik, dan Informasi telah melaksanakan validasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2024 memperoleh hasil **90,78** yaitu kinerja penyelenggaraan publik KKP **sangat baik** dan telah menyampaiakn hasilnya kepada masing-masing PIC layanan Eselon I.

Tindak lanjut pelaksanaan pada triwulan selanjutnya adalah :

1. Melakukan evaluasi kegiatan atas rangkaian penilaian KIPP untuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tahun 2025;
2. Mengawal beberapa penilaian diantaranya:
   a. Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi oleh Kementerian PANRB, penilaiannya telah selesai dan Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Instansi Pembina Inovasi Terbaik tahun 2024, untuk inovasi yang lolos sampai tahap wawancara adalah inovasi Pugar dari Direktorat Jasa Kelautan;
   b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB dengan lokus BPSPL Pontianak, saat ini penilaian sudah sampai pada tahap penyampaian dokumen dan akan mulai dievaluasi secara langsung;
   c. Penilaian Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan dengan 5 lokus yaitu: Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang, DJPKRL, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, DJPT, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, DJPT, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, DJPB, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, DJPSDKP. Sosialisasi akan dilakukan oleh Kementerian PANRB pada hari ini secara *online*.

Gambar 11. Penilaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik KKP 2024

3.2.7 Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi

Persentase pemenuhan data citra satelit dan informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang terpenuhi merupakan penilaian atas layanan yang diberikan oleh Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan diturunkan kepada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) kepada seluruh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal. Layanan yang diberikan terdiri dari :

1. Penyediaan Data Citra Satelit; dan
2. Penyediaan Informasi Geospasial.

   Memfasilitasi verifikasi dan validasi data-data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang disediakan oleh BPISDKP, untuk memastikan bahwa data-data tersebut telah memenuhi kriteria verifikasi dan validasi yang sesuai serta telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh stakeholder. Mengingat tugas dan fungsi BPISDKP sebagai balai yang mengelola informasi geospasial sumber daya kelautan dan perikanan, verifikasi dan validasi data perlu dilakukan untuk menjamin kualitas dan keakuratan data. Indikator kinerja tersebut diukur melalui jenis data geospasial sumber daya kelautan dan perikanan yang diverifikasi dan divalidasi sesuai dengan standar data geospasial yang telah disahkan oleh Kepala BPISDKP, serta dimanfaatkan oleh *stakeholder*. Pada tahun 2023, IKU ini memiliki target 2 jenis data dan telah tercapai sesuai target.

Untuk tahun 2024, target tidak hanya difokuskan pada jumlah jenis data yang dihasilkan, namun juga pada pemanfaatan data tersebut. Target yang diharapkan pada tahun 2024 adalah 100% data geospasial yang dihasilkan BPISDKP telah terverifikasi, tervalidasi dan termanfaatkan oleh *stakeholder*.

Table 19. Target dan Realisasi IKU Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**												
Nama IKU	**Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**												
Realisasi					**2024**				**Renstra 2020-2024**				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**	**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**	
-	-	-	-	**100**	-	-	-	-	**76**	-	**77**	-	

IKU ini merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan III Tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Hingga Juni 2024, telah dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya IKU yaitu koordinasi tim teknis dan analisa data. Tidak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan selama Triwulan III

Kegiatan selanjutnya untuk mendukung Indikator ini adalah :

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan BPISDKP Triwulan III tahun 2024;
2. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan BPISDKP periode triwulan selanjutnya.

3.2.8 Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi. Diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh.

Evaluasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber akan menghasilkan nilai indeks yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) di instansi KKP berdasarkan tanggapan atas pertanyaan dari setiap kuesioner yang digunakan.

Kuesioner merupakan instrumen pengukuran maturitas penanganan siber dan sandi untuk memetakan tingkat kesiapan organisasi terhadap kemampuan penanganan dan menanggapi insiden keamanan siber.

Gambar 12. Aspek Pengukuran dan Tingkat Kematangan Keamanan Siber

Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dilakukan terhadap 5 aspek :

1. Tata Kelola;
2. Identifikasi;
3. Proteksi;
4. Deteksi; dan
5. Respon.

Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Apabila BSSN tidak melakukan penilaian, maka hasil capaian menggunakan hasil dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP.

Table 20. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**												
Nama IKU	**Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP**												
Realisasi					**2024**				**Renstra 2020-2024**				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III**	**Target 2024**	**% Capaian Thdp**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp**	

								2023-2024		Target 2024		Target 2025
-	-	-	-	3,08	2,5	3,40	136	110,38	2,5	136	2,6	130,76

IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode tahunan. BSSN telah melakukan Penilaian dan Verifikasi Tingkat Kematangan Keamanan Siber (*Cyber Security Maturity*) Tahun 2024 lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 27 – 31 Mei 2024, berdasarkan Surat Dinas Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Nomor 94/BSSN/D3/PS.02.02/01/2024 tanggal 5 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Penilaian dan Verifikasi *Cyber Security Maturity* (CSM) Tahun 2024.

Gambar 13. Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024

Dari hasil verifikasi oleh Tim Verifikator BSSN, Tingkat Kematangan Keamanan Siber Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 mendapatkan indeks sebesar 3,40. Sehingga dengan Indeks Kematangan tersebut dapat ditentukan bahwa level kematangannya ada pada tingkat kematangan level 3.

Tata Kelola		Identifikasi		Proteksi		Deteksi		Respon	
2,97		3,64		3,06		3,49		3,83	
Kesadaran	2,71	Manajemen Aset	3,25	Jaringan	3,71	Perubahan	4,67	Penahanan	3,67
Audit	2,75	Inventaris	4,20	Aplikasi	2,80	Monitor	3,50	Penanggulangan	3,80
Kontrol	3,61	Manajemen Risiko	3,46	Pengguna	1,67	Peringatan	3,25	Pemulihan	4,00
Pemenuhan	1,68	Prioritas	4,20	Manajemen Identitas dan Aset	3,46	Pemberitahuan	3,40	Kegiatan Paska Insiden	4,25
Kebijakan	2,90	Pelaporan	4,00	Cloud	3,00	Intelijen	2,73	Pelaporan	3,43
Proses	4,14	Klasifikasi	2,75	Data	3,71	Pelaporan	3,40		

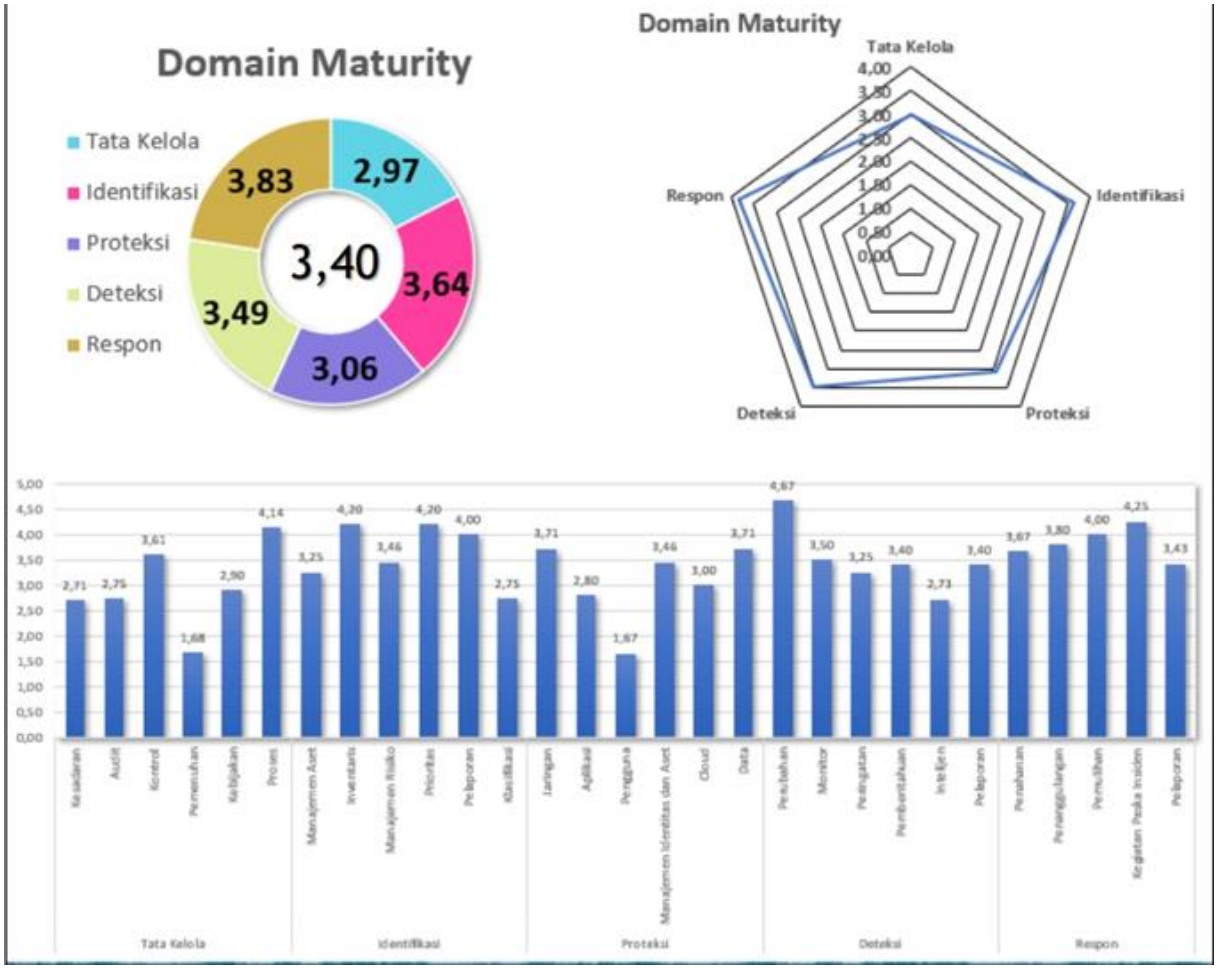

Gambar 14. Hasil Penilaian dan Verifikasi Cyber Security Maturity (CSM) 2024

Dengan demikian, secara kualitatif dapat digambarkan bahwa penerapan keamanan siber yang prosesnya sudah terorganisir dengan jelas, bersifat formal, dilakukan secara berulang, dilakukan reviu berkala, dan konsisten. Namun penerapan perubahan belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum menjadi membudaya dan terintegrasi serta menerapkan otomatisasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk tercapainya IKU ini adalah:

1. Melaksanakan rapat koordinasi penyiapan dokumen tingkat kematangan keamanan siber dengan BSSN; dan
2. Pelaksanaan penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP oleh BSSN dilakukan pada tanggal 27 - 31 Mei 2024.
3. Melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut laporan anomali trafik dengan BSSN.
4. Telah melakukan kegiatan *Vulnerability Assessment* selama Bulan Juli – September 2024 pada Sistem Elektronik KKP berikut :
   a. pipp.kkp.go.id
   b. portaldata.kkp.go.id
   c. sichupang-mataram.kkp.go.id
   d. sipina.kkp.go.id
   e. eslo.kkp.go.id
   f. ssa.kkp.go.id
   g. mi.kkp.go.id
   h. siapmutu.kkp.go.id
   i. bp3ambon.kkp.go.id
   j. Aplikasi E-Laut BPPSDMKP
   k. Aplikasi Observer DJPT
   l. Aplikasi JDIH Biro Hukum
5. Selama Bulan Juni – September 2024 telah terjadi beberapa insiden siber di KKP sbb :
   - 9 (sembilan) kali serangan DDOS Attack
   - 19 (sembilan belas) kali serangan defacement slot gacor judi online
   - 1 (satu) Laporan Kebocoran Data e-pegawai
6. Website aplikasi yang terkena serangan adalah :
   - e-sea.kkp.go.id
   - epegawai.kkp.go.id
   - eplanning.kkp.go.id
   - eslo.kkp.go.id
   - integrasi.djpt.kkp.go.id
   - jaddi.bkipm.kkp.go.id
   - kapal.kkp.go.id
   - pipp.kkp.go.id
   - portal.kkp.go.id
   - sibatik.kkp.go.id
   - sidakokkhl.kkp.go.id
   - simlatluh.kkp.go.id
   - spkp.kkp.go.id

7. website aplikasi yang ter-*compromise* telah dilakukan remediasi dengan penghapusan malware, penutupan celah keamanan, implementasi WAF dan Instalasi Antivirus;
8. Pelaksanaan penilaian ISO 27001 telah dilaksanakan pada Agustus 2024 dan masih dalam tahap perbaikan temuan minor audit stage 2 dan menunggu proses penerbitan sertifikat.

Tindak lanjut pelaksanaan IKU Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP pada triwulan selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan evaluasi hasil asesmen Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP yang dilakukan oleh BSSN; dan
2. Melakukan koordinasi dalam rangka perbaikan Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP;
3. Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber (*Cyber Security Maturity*) pada Oktober 2024.

3.2.9 Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan

Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan merupakan alat bantu untuk mengukur penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia (SDI) yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Evaluasi Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan akan menghasilkan nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia di instansi KKP berdasarkan jawaban atas pertanyaan dalam Lembar Kerja SDI.

Pengukuran Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan dilakukan terhadap aspek-aspek berikut :

1. Pembiayaan;
2. Kelembagaan;
3. SDM;
4. Teknologi Informasi;
5. Penyelenggaraan;
6. Koordinasi;
7. Pengelolaan dan Pemanfaatan; dan

8. Regulasi.

Penilaian Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan mendukung Satu Data Indonesia dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Apabila Kementerian PPN/Bappenas tidak melakukan penilaian, maka hasil capaian menggunakan hasil dari penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal KKP.

Table 21. Target dan Realisasi IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**												
Nama IKU	**Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan**												
Realisasi					**2024**				**Renstra 2020-2024**				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**	**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**	
-	-	-	-	**89,17**	-	-	-	-	**70**	-	**71**	-	

IKU Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan baru dilaksanakan pada tahun 2023, dan merupakan IKU yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan III belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Untuk mendukung IKU tersebut, Pusdatin diundang pada kegiatan pendampingan pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia. Yaitu penyusunan standar data dan metadata data prioritas lingkup KKP.

Sekretariat Satu Data Indonesia akan melakukan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Daerah melalui penghitungan Indeks SDI. Dalam hal ini, terdapat beberapa Domain, Aspek, Indikator penilaian Evaluasi pelaksanaan SDI yang akan dipergunakan dalam menyusun Indeks SDI. KKP telah berpartisipasi dalam pengisian kuesioner *Analitical Hierarchy Proccess* (AHP) indeks Satu Data Indonesia. Pengisian kuesioner dilakukan melalui link berikut https://link.bappenas.go.id/KuesionerAHPIndeksSDI .

1. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung IKU dimaksud adalah Pengembangan Aplikasi Satu Data Modul Kusuka, sarana prasarana pelaku usaha lebih dari satu beserta statusnya akan ditampilkan pada *dashboard*
2. Dilaksanakan Validasi Nasional Semester I 2024 pada Bulan Oktober 2024.

3. Pada triwulan III Tahun 2024 terjadi penambahan total pelaku usaha sebanyak 105.725 pelaku usaha atau mengalami kenaikan sebesar 43,22 persen dibandingkan triwulan III Tahun 2023;
4. Estimasi total volume produksi perikanan triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 6,44 juta ton, yang terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 2,02 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 4,42 juta ton. Produksi perikanan triwulan III Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,52 persen dibandingkan dengan angka sementara produksi perikanan triwulan III Tahun 2023 (*year-on-year*).
5. Telah diselesaikan oleh PT Bagus Harapan Tritunggal seluruh kegiatan pembangunan platform portal dan big data engine digitalisasi perizinan terdiri dari 12 modul, terdiri dari: Kusuka, Produksi, Validasi Nasional, Pengawasan, Bantuan Pemerintah, Satu Peta, Media Analitik, Kinerja, Big Data, Perizinan, User Management, dan Pendanaan Inovatif. Platform tersebut dapat diakses pada https://portaldata.kkp.go.id;
6. Platform https://portaldata.kkp.go.id tersebut menyajikan data publikasi statistik dan spasial dilengkapi standard data dan metadata yang dapat diakses publik;

Gambar 15. Rapat Koordinasi Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan

3.2.10 Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

Dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dijelaskan bahwa arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur SPBE diterapkan dalam

3 (tiga) ruang lingkup, yakni pada lingkup Nasional, lingkup Instansi Pusat, dan lingkup Pemerintah Daerah. Sebagaimana diketahui, SPBE bukan hanya merupakan IKU KKP dan Pusdatin, tapi juga menjadi bagian penting dalam program Reformasi Birokrasi (RB). Pada tahun 2024, Nilai Tingkat Kebijakan Arsitektur SPBE yang digunakan untuk RB adalah nilai Indeks Indikator 1, yaitu "Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah". Indikator 1 ini kemudian mendapatkan nilai 2 karena KKP sudah memiliki kebijakan Arsitektur SPBE, yaitu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2024.

Table 22. Target dan Realisasi IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**												
Nama IKU	**Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP**												
Realisasi						**2024**				**Renstra 2020-2024**			
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**		**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**
-	-	-	-	**4,8**	-	-	-	-		**3**	-	**3**	-

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Implementasi Kebijakan Aristektur SPBE KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan III ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2024 untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah :

1. Melaksanakan rapat proses bisnis Level 1 dengan unit kerja terkait;
2. Melakukan pengisian SIA SPBE V2 dengan Unit Eselon I lingkup KKP dengan pendampingan oleh Kementerian PAN dan RB;

Tindak lanjut kegiatan pada triwulan selanjutnya adalah melakukan *review* pengisian SIA SPBE V2 dengan Kementerian PAN dan RB.

3.2.11 Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

Pencapaian sasaran Reformasi Birokrasi Nasional melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung dengan penggunaan data dan informasi statistik. Penggunaan data dan informasi statistik digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah. Data dan informasi statistik tersebut dikelola sesuai prinsip satu data indonesia melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi.

Penyediaan data dan informasi statistik dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan, meliputi Instansi Pusat, Pemerintahan Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), dan masyarakat dalam kerangka penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN). Menurut pemanfaatannya, statistik dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar, Statistik Sektoral, dan statistik khusus. Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data indonesia dan penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) dari penyelenggaraan Statistik Sektoral pada Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

EPSS sendiri merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan BPS secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk :

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Table 23. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP												
Nama IKU	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP												
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024				
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025	
-	-	-	-	2,68	-	-	-	-	2,75	-	3	-	

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan II ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan EPSS KKP ini merupakan hasil penilaian eksternal yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan baru dilaksanakan oleh KKP di tahun 2023 dengan perolehan nilai sebesar 2,68, dimana kegiatan statistik sektoral yang dinilai adalah :

1. Pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
2. Pendataan Produksi kelautan dan Perikanan.
3. Pada 25 Juni 2024 telah dilakukan penilaian EPSS oleh Tim Pembina BPS dan hasilnya akan disampaikan pada Oktober 2024.

Kegiatan yang dinilaikan pada Tahun 2024 adalah:

1. Pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;
2. Pendataan Produksi Budi daya.

Beberapa perbaikan telah dilakukan untuk penilaian Tahun 2024, yaitu:

1. Domain Kualitas Data untuk Indikator Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna berupa:
   a. SOP Permintaan Data
   b. Penyusunan kuesioner kepuasan terhadap data sebagaimana pada link berikut : https://forms.office.com/r/1Gd16YVD3k.
2. Domain Statistik Nasional Aspek Pemanfaatan Data Statistik berupa:
   a. Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Kriteria berupa:

Penggunaan data NTN, NTPi, PDB Perikanan, dan data ekspor yang merupakan statitik dasar perhitungan dari BPS, sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam rencana strategis (Renstra) KKP 2020 - 2024 yang tertuang dalam PermenKP no 17 tahun 2020.

b. Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan Kriteria berupa: Penggunaan data statistik sektoral dalam sasaran strategis (SS) salah satunya pada SS-7 "industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing" dengan indikator kinerja: produksi perikanan, produksi garam nasional, dana yang disalurkan untuk pelaku usaha KP skala kecil, dan kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan pada Renstra KKP 2020 – 2024.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah :

1. Melakukan pendataan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan pada Lokasi sampling, antara lain Jawa Barat dan Jawa Tengah
2. Melakukan pendataan produksi Perikanan Budi Daya dan Perikanan Tangkap
3. Melakukan validasi nasional Semester I 2024
4. Melaksanakan kegiatan reviu terhadap domain dan indicator dalam EPSS

Gambar 16. Koordinasi Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP

3.2.12 Indeks Pelayanan Publik KKP

Pelayanan merupakan bagian integral dan strategis bagi pengembangan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan serta pemenuhan pelayanan publik. Keberhasilan birokrasi dan pelayanan yang berkualitas merupakan harapan masyarakat.

Kesadaran Unit Pelayanan Publik dalam mewujudkan Pelayanan Prima agar masyarakat memperoleh pelayanan yang baik, salah satunya diwujudkan dengan melakukan perbaikan atas kualitas pelayanan publik melalui kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pada Pasal 7 ayat (2) huruf b juga mengamanatkan kepada Penanggung jawab untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Merujuk pada ketentuan tersebut, perbaikan atas kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari seluruh instansi penyelenggara pelayanan. Dengan demikian, kebutuhan akan pelayanan yang berkualitas menjadi prioritas untuk diwujudkan. PEKPPP merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan PEKPPP telah dilakukan setiap tahun yang menghasilkan nilai IPP. Dari kegiatan yang telah dilakukan secara periodik itu, kegiatan pemantauan atas hasil evaluasi belum menjadi bagian yang penting untuk dilakukan dan hanya berfokus pada kegiatan evaluasi. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kegiatan pemantauan agar proses PEKPPP seluruhnya dapat berjalan dengan maksimal. Pelaksanaan PEKPPP dapat dilakukan secara langsung di lokasi Unit Lokus Evaluasi (ULE) maupun secara *daring*.

Table 24. Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik KKP Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**												
Nama IKU	**Indeks Pelayanan Publik KKP**												
Realisasi					**2024**				**Renstra 2020-2024**				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**	**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**	
4,18	**4,33**	**4,58**	**4,58**	**4,64**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,59**	**-**	**4,65**	**-**	

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel di atas, realisasi IPP KKP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Periode penghitungan capaian IKU IPP KKP adalah periode tahunan. Pusat Data, Statistik, dan Informasi telah melakukan beberapa kali pendampingan terhadap BPSPL Pontianak baik secara luring maupun daring. Pada Triwulan III telah dilakukan Evaluasi oleh Kementerian PANRB ke BPSPL Pontianak tepatnya pada tanggal 11 s.d 14 Agustus 2024. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Surat dari Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/255/PP.02/2024 tanggal 26 Juli 2024 hal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi Lapangan Bulan Agustus dan September 2024;

Gambar 17. Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenPANRB di BPSPL Pontianak

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam bentuk pendampingan pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik oleh eksternal;
2. Menindaklanjuti saran/rekomendasi hasil PEKPPP dari tim penilai internal yang diwakili oleh Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat DJPKRL, dan perwakilan tim dari Eselon I lain yang turut memberikan masukan dan pendampingan;
3. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Kementerian PANRB dengan lokus BPSPL Pontianak, saat ini penilaian telah sampai pada tahap penyampaian dokumen dan dievaluasi secara lansung pada tanggal 19 Agustus 2024;

4. Penilaian Penyelenggaraan pelayanan Publik Sarana dan Prasarana Kelompok Rentan dengan 5 lokus yaitu: Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang, DJPKRL, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, DJPT, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, DJPT, Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, DJPB, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, DJPSDKP. Tim pelayanan publik Kementerian PANRB telah dmelaksanakan Kunjungan Lapangan pada lokus BPBL Batam pada tanggal 18 September 2024.

Tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya adalah:

1. Melaksanakan rekomendasi yang akan diberikan oleh Kementerian PANRB atas hasil penilaian PEKPPP;
2. Melaporkan hasil evaluasi PEKPPP kepada Sekretaris Jenderal.

3.2.13 Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

Sebagai bentuk inovasi pengawasan pelayanan publik, mulai tahun 2022 Ombudsman RI melakukan penyempurnaan lagi atas metode penilaian penyelenggaraan pelayanan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, serta pengawasan dan pengelolaan pengaduan. Maksud dari penilaian ini yaitu mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengaduan. Semua penilaian tersebut, menjadi komponen dari Opini Pengawasan Ombudsman RI terhadap Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Perubahan ini diharapkan menjadi lebih komprehensif lagi dalam menakar mutu pelayanan publik: dimensi input dan proses (*service manufacturing*) hingga *output* dan dampak (*impactful public service*).

Kemudian pada tahun 2023 kembali dilakukan penyempurnaan dan pengembangan variabel serta indikator penilaian yaitu: penilaian pada Kementerian dan Lembaga ditambahkan variabel Indeks Kepuasan Masyarakat sedangkan penilaian pada Pemerintah Daerah ditambahkan Standar Pelayanan

Minimal. Dimana hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.

Table 25. Target dan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**												
Nama IKU	**Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP**												
Realisasi						**2024**				**Renstra 2020-2024**			
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**		**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**
-	-	**86,66**	**89,37**	**88,86**	-	-	-	-		**85**	-	**86**	-

Periode penghitungan capaian IKU Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan III ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Gambar 18. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lokus UPP oleh Ombudsman RI

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU ini adalah:

1. Menyampaikan dan menghimbau kesiapan dan kehadiran Pejabat Eselon II pada Unit Kerja selaku Responden Pimpinan Pelayanan dan agar tidak diwakilkan karena akan mempengaruhi persepsi dan penilaian dari Tim

Ombudsman RI melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 2457/SJ.7/TU.210/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024;

2. Menyelenggarakan koordinasi dalam bentuk pendampingan pengecekan data dukung dan kesiapan responden internal bagi 5 (lima) Lokus Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) yang akan dilakukan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 pada tanggal 8 Juli 2024;
3. Membuat *spreadsheet checklist* pemantauan capaian pemenuhan data dukung penilaian UPP, yaitu https://bit.ly/Checklist_Ombudsman_2024;
4. Menyusun 13 (tiga belas) data dukung penilaian yang akan digunakan bersama oleh UPP, yaitu yang difasilitasi oleh PTSA, meliputi:
    - Ketersediaan jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan;
    - Hasil evaluasi kinerja pelaksana layanan (Hasil Penilaian *Reward dan Punishment*);
    - Penyampaian hasil SKM kepada Unit Eselon II penyelenggara perizinan di PTSA KKP;
    - Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pengguna layanan;
    - Ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas bagi pengguna dengan perlakuan khusus (kelompok rentan);
    - Standar Pelayanan PTSA KKP dan publikasinya melalui media elektronik dan nonelektronik;
    - Maklumat PTSA KKP dan publikasinya melalui media elektronik dan nonelektronik;
    - Visi Misi Pelayanan PTSA KKP dan publikasinya;
    - Motto Pelayanan PTSA KKP dan publikasinya;
    - Jargon PTSA KKP dan publikasinya;
    - Foto petugas PTSA KKP lengkap dengan atribut pelayanan;
    - Ketersediaan sarana prasarana penanganan pengaduan di PTSA KKP;
    - Peningkatan kompetensi melalui Bimbingan Teknis Penanganan Pengaduan;

5. Menyusun ringkasan atau kisi-kisi materi wawancara penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk pertanyaan beserta jawabannya untuk memudahkan responden internal;
6. mendampingi dan berperan sebagai narahubung pada saat pelaksanaan penilaian oleh Tim Ombudsman secara intensif atas 5 (lima) Lokus UPP, yaitu pada tanggal 11 s.d 17 Juli 2024.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan IKU ini adalah:

1. Berkoordinasi dengan Lokus UPP untuk menindaklanjuti rekomendasi yang akan diberikan oleh Ombudsman RI berdasarkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP; dan
2. Melaporkan hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik KKP Tahun 2024.

3.2.14 Survei Kepuasan Masyarakat KKP

Dalam rangka mengetahui dan mengukur sejauh mana kualitas pelayanan publik Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan, yaitu dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara. Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup KKP.

IKU SKM merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode triwulanan, dan baru dilaksanakan di tahun 2023. Berikut ini adalah hasil penyelenggaraan SKM KKP periode Triwulan III Tahun 2024 per Unit Eselon I melalui *tools* SKM :

Unit Eselon I	UPP Aktif	UPP Melakukan SKM	Layanan dilaksanakan SKM	Jumlah Responden	Nilai SKM
DJPKRL	12	12	15	446	92,78
DJPT	26	26	37	6.019	90,55
DJPB	18	17	12	1.011	91,50
DJPDSPKP	5	5	10	407	88,42
DJPSDKP	15	15	5	1.713	93,31
BPPSDMKP	17	13	33	1.424	90,35
BPPMHKP	47	47	12	2.980	93,53
SETJEN (PTSA)	1	1	22	208	88,82
KKP	**141**	**136**	**130**	**14.208**	**91,54 Sangat Baik**

Rincian nilai per Unsul Pelayanan SKM KKP Triwulan III Tahun 2024 yaitu :

Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
U1 - Persyaratan Layanan	3,71
U2 - Kemudahan Prosedur	3,69
U3 - Waktu Penyelesaian	3,65
U4 - Kesesuaian Biaya	3,66
U5 - Kesesuaian Produk	3,66
U6 - Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas	**3,63**
U7 - Kemudahan Fitur/Perilaku Petugas	3,67
U8 - Layanan Konsultasi	**3,65**
U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana	**3,64**

Tabel berikut adalah hasil capaian realisasi IKU SKM KKP Triwulan III Tahun 2024:

Table 26. Target dan Realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP

Sasaran Kegiatan	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP											
Nama IKU	Survei Kepuasan Masyarakat KKP											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW II 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	-	91,01	88,30	91,54	103,67	0.26	88,30	103,67	89	102,85

Pada tabel terlihat bahwa realisasi IKU Survei Kepuasan Masyarakat KKP ini adalah 91,54 yang artinya capaiannya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu

88,30. Apabila dicerminkan terhadap target tahun 2024, realisasi ini telah mencapai target 103,67%.

Analisis atas hasil SKMU KKP Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden sebanyak 14.208 dengan hasil SKM 91,54 kategori mutu pelayanan "Sangat Baik (A)". Jumlah responden meningkat sebanyak 5% dibandingkan periode sebelumnya, dimana kenaikan terbanyak pada responden Ditjen. Perikanan Tangkap. Namun demikian, pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDMKP terjadi penurunan jumlah responden yang signifikan sebesar 47% yang diikuti dengan penurunan jumlah UPP pelaksana SKM;
2. Presentase UPP yang melaksanakan SKM Triwulan III Tahun 2024 sebesar 96%, yaitu 136 (seratus tiga puluh enam) UPP yang terdiri dari UPP Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis;
3. UPP yang tidak memiliki responden, yaitu Direktorat Air Payau, Politeknik KP Bone, SUPM Ladong, SUPM Pariaman, dan SUPM Tegal. Sementara itu, terdapat 2 (dua) UPP dengan responden tunggal yang dianggap valid, yaitu pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan;
4. Jumlah layanan yang dilakukan SKM pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebanyak 130 (seratus tiga puluh) layanan, dengan layanan terbanyak pada Ditjen. Perikanan Tangkap sebanyak 37 layanan; dan
5. Seluruh unsur pelayanan mendapatkan Nilai rata-rata (NRR) lebih dari 3 (tiga) dengan rata-rata keseluruhan 3,66 dan menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 91,54. Sementara itu, 3 (tiga) unsur pelayanan dengan nilai terendah yang perlu menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti, yaitu U6 - Kecepatan Respon atau Kompetensi Petugas, U9 - Kualitas Isi/Sarana Prasarana, dan U8 - Layanan Konsultasi dan Pengaduan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator Kinerja ini adalah:

1. Melakukan validasi hasil responden yang dihimpun melalui tools SKM bersama Sekretariat Eselon I;

Gambar 19. Validasi SKM TW III

2. Memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM pelaksana SKM dalam hal menganalisis data hasil SKM, menyusun rencana tindak lanjut dan laporan yang sesuai dengan format;

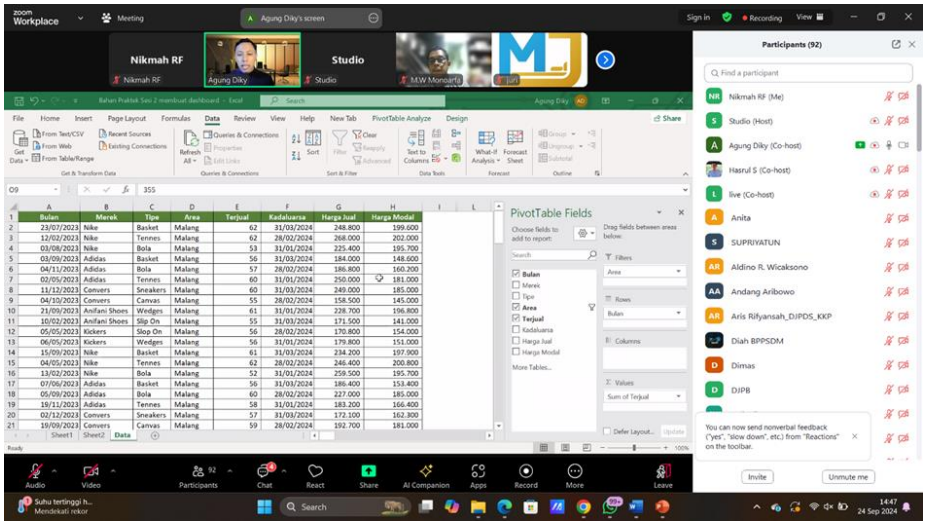

Gambar 20. Peningkatan kompetensi Admin SKM

3. Menghimpun data dan laporan hasil pelaksanaan SKM per UPP periode triwulan III dan IV tahun 2023 sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Kementerian PANRB;
4. Membangun *dashboard* rekapitulasi pelaporan SKM per Unit Eselon I per triwulan pada tools SKM untuk memudahkan pemantauan kedisiplinan pelaporan;

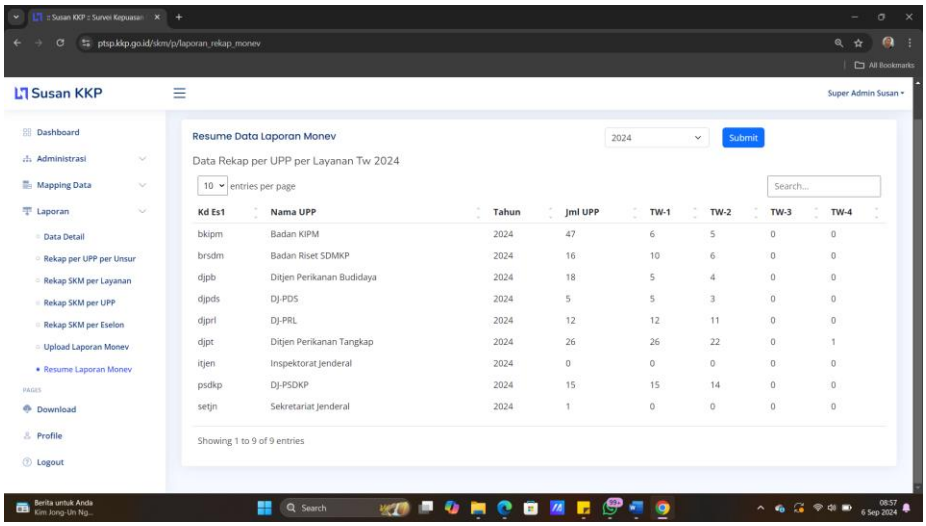

Gambar 21. Dashboard rekapitulasi pelaporan SKM

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk mendukung IKU ini adalah:

1. Menghimpun data dan laporan pelaksanaan SKM per UPP periode tahun 2024 sebagai bahan pelaporan kepada Kementerian PANRB;
2. Menyampaikan daftar UPP yang tidak memiliki responden SKM kepada Sekretariat Eselon I sebagai bahan evaluasi Unit Kerja; dan
3. Menyusun pedoman penggunaan aplikasi Si-Susan per level pengguna.

3.2.15 Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktifitas, alat, damengetahun prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggunjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan SAKIP lingkup Pusdatin adalah untuk :

1. Mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP di Pusdatin
2. Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan bersifat orientasi;

3. Memperoleh informasi tentang implemtasi SAKIP lingkup Pusdatin;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi lingkup Pusdatin; dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Table 27. Target dan Realisasi IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin

Sasaran Kegiatan	**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi**												
Nama IKU	**Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin**												
Realisasi					**2024**				**Renstra 2020-2024**				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**	**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**	
-	-	-	-	**87,15**	-	-	-	-	**84**	-	**85**	-	

Periode penghitungan capaian IKU Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin adalah periode tahunan, sehingga pada Triwulan III ini belum terdapat data realisasi dan capaian yang dihasilkan. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung IKU antara lain adalah :

1. Menyiapkan seluruh dokumen pendukung PM SAKIP, yang terdiri dari :

a. Perjanjian Kinerja;
b. Manual IKU;
c. Rincian Target IKU;
d. Rencana Aksi;
e. LKJ Level 2;
f. Data dukung LKJ.

2. Menginput perencanaan dan hasil kinerja satuan kerja di aplikasi KINERJAKU Triwulan II tahun 2024;
3. Menerapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk monitoring kinerja individu;
4. Rapat Tim Pengelolaan Kinerja untuk memantau target, realisasi, capaian dan data dukung yang diinput pada aplikasi Kinerjaku Triwulan II;

5. Meng-upload dokumen kelengkapan SAKIP Pusdatin ke dalam google drive, http://bit.ly/DokumenSAKIPSetjen. Dan http://bit.ly/DokumenSAKIP Pusdatin.

Tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah :

1. Menyiapkan data capaian yang dihitung secara triwulanan;
2. Menyiapkan Laporan Kinerja triwulanan agar dapat disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan hasil review oleh Tim SAKIP KKP.

Gambar 22. Rapat Penyiapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Monitoring Kinerja Individu

3.2.16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi adalah sebagaimana tercantum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2024, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

IKU ini merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode semesteran, sehingga pada Triwulan III Tahun 2024 atau Semester II (Juli s.d Desember 2024) belum terealisasi.

Table 28. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP

Sasaran Kegiatan	**Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**											
Nama IKU	**Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP**											
Realisasi					**2024**				**Renstra 2020-2024**			
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**	**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**
-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-

IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundan-Undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi merupakan IKU yang pengukurannya dilakukan secara semesteran, dan pada Triwulan III ini telah tersusun Keputusan Menteri tentang Data Induk Penyakit Ikan, dimana pokok materi muatannya adalah menetapkan struktur basis data dan data induk penyakit ikan; dan struktur basis data dan data induk penyakit ikan berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan database penyakit ikan.

Berdasarkan Memorandum Dari Kepala Biro Hukum dengan nomor 1483/SJ.4/HK.160/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, telah diterbitkannya dokumen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Struktur Basis Data Penyakit Ikan dan Data Induk Penyakit Ikan dapat diunduh pada laman jdih.kkp.go.id.

Capaian IKU Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundan-Undangan Bidang Data, Statistik, dan Informasi telah tercapai pada triwulan III 2024.

Gambar 23. Rapat Koordinasi Progsun Struktur Basis Data Penyakit Ikan dan Data Induk Penyakit Ikan

3.2.17 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin

Sebagai kontrol dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) melakukan audit per semester setiap tahunnya. Teknik menghitung indikator ini yaitu :

1. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil *review* Itjen terhadap Laporan Keuangan (LK) Semester II tahun berjalan (dengan batas waktu penyelesaian bulan September) dan LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian bulan Februari n+1), baik jumlah kejadian maupun nilai uang;
2. Menghitung tingkat penyesuaian/koreksi atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap LK tahunan/n-1 (dengan batas waktu penyelesaian 7 hari kerja setelah diterimanya CATATAN HASIL PEMERIKSAAN), baik jumlah kejadian maupun nilai uang; dan
3. Bobot jumlah kejadian dengan nilai uang adalah 50%:50%.

Table 29. Target dan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
100	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	100	-

Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusdatin merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2024 ini belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian IKU ini adalah:

1. Menyiapkan data dukung dalam rangka audit yang dilakukan oleh BPK Tahun 2024;
2. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menindaklanjuti temuan BPK, dengan melengkapi data dukung rekomendasi hasil audit;
3. Berkoordinasi dengan Biro Keungan sebagai Tim Tindaklanjut Lingkup Setjen;
4. Monitoring kegiatan penyelesaian Temuan BPK lingkup Pusdatin tahun sebelumnya;
5. Peningkatan kepatuhan satker mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara online.

Gambar 24. Rapat Penyelesaian Temuan BPK

3.2.18 Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin

Indeks profesionalitas (IP) ASN merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Komponen IKU IP ASN terdiri dari:

1. **Kualifikasi (bobot 25%)** yaitu sesuai dengan pendidikan terkahir dari masing-masing pegawai:
2. **Kompetensi (bobot 40%)** terdiri dari:
   a. Diklatpim, sesuai dengan jenjang jabatan struktural, misalkan pejabat eselon III belum melaksanakan diklatpim Tk. III, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan diklatpim sesuai jenjang strukturalnya maka nilainya 15 (lima belas);
   b. Diklat Fungsional atau Teknis, sesuai dengan jabatan fungsionalnya, misalkan seorang pejabat fungsional belum pernah sama sekali melaksanakan diklat fungsional, maka nilainya 0 (nol), apabila sudah melaksanakan sekali saja diklat fungsional, maka nilainya 15 (lima belas);
   c. Diklat 20 JP (Jam Pelajaran) merupakan diklat yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai dengan total diklat tersebut minimal 20 JP dalam setiap tahun, pada pejabat struktural dan fngsional, apabila sudah

melaksanakan akan mendapat nilai 15 (lima belas) dan Staf nilainya 22,5 (dua puluh dua kima lima). Contoh Diklat 20 JP yaitu berupa Diklat/pelatihan Bendahara, PBJ, Keuangan, Komputer, Bahasa Inggris, Bimbingan Teknis, Sosialisasi, dll, dimana semua kegatan tersebut dengan data dukung sertifikat yang mencantumkan jumlah jam pelatihan atau tanggal mulai serta tanggal selesai;

d. Seminar, Workshop atau Lokakarya merupakan pelatihan sehari yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pegawai, pada pejabat struktural dan fungsional, apabila sudah melaksanakan akan mendapat nilai 10 (sepuluh) dan Staf nilainya 17,5 (tujuh belas koma lima);

3. **Kinerja (bobot 30%)** merupakan nilai Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun terakhir yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai dengan metode 3600;
4. **Disiplin (bobot 5%** mengambil dari hukuman disiplin apakah sudah diterima atau belum, apabila tidak pernah mendapat hukuman disiplin pada lima tahun terakhir, maka nilainya 5, apabila mendapat hukuman disiplin, maka nilainya akan turun sesuai tingkat hukuman disiplinnya.

   Metode Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (PIP ASN) Tahun 2024 Katagori dalam Pengukuran IP ASN yaitu:

No	Nilai	Kategori
1	91 - 100	Sangat Tinggi
2	81 - 90	Tinggi
3	71 - 80	Sedang
4	61 - 70	Rendah
5	0 - 60	Sangat Rendah

Terdapat 4 (empat) komponen dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (PIP ASN) yaitu:

A. Kualifikasi bobot nilai 25, mengalami penyesuaian bobot dimensi Sebelumnya:

No	Nama Kualifikasi *)	Nilai
1	Pendidikan S3	25
2	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1/D.IV	15
4	Pendidikan DIII/SM	10
5	Pendidikan DII/DI/SMA	5
6	Pendidikan SMP/SD	1

Saat ini:

Dimensi	Jenjang Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal diangkat kedalam jabatan	Pendidikan yang diperoleh PNS (Bobot)					
			S3	S2	SI/DIV	DIII	DII/DI/SLTA / Sederajat	Dibawah SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA Sederajat	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA / Sederajat	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	SI/ DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

B. Kompetensi bobot nilai 40

No	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi		
		Struktural	Jabfung	Staf
I	**Diklat Struktural**			
	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
II	**Diklat Fungsional**			
	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-

III	**Diklat 20 JP Tahun berjalan**			
	Pernah Ikut Diklat Teknis/Umum total 20 JP	15	15	22.5
	Tidak Pernah atau tidak cukup total 20 JP Diklat Teknis/Umum	0	0	0
IV	**Seminar 2 Tahun Terakhir**			
	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
	Tidak Pernah Ikut Seminar selama 2 Tahun Terakhir	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

Kompetensi mengalami penyesuaian bobot dari yaitu: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional.

B. Kinerja (Nilai SKP Tahun 2021) bobot nilai 30

Sebelumnya:

No	Keterangan Nilai Kinerja ***)	Nilai Kinerja	Nilai
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Disiplin bobot nilai 5

No	Nama Hukuman Disiplin ****)	Nilai
1	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
2	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat ***Ringan***	3
3	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat ***Sedang***	2
4	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat ***Berat***	1

Penyesuaian Riwayat Hukuman Disiplin dari sebelumnya 5 (lima) tahun terakhir menjadi 1 (satu) tahun terakhir

Rumusan IP ASN KKP sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019

$$IP = \sum_{i=1}^{4} IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$
$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$
$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$
$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Table 30. Target dan Realisasi IKU Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin Triwulan II Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi**											
Nama IKU	**Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin**											
Realisasi					**2024**				**Renstra 2020-2024**			
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW II 2023-2024**	**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**
-	83,47	85,36	85,79	90,50	-	-	-	-	85	-	87	-

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pusdatin merupakan Indikator Kinerja yang dihitung periode semesteran, sehingga pada triwulan III Tahun 2024 ini tidak dilakukan pengukuran capaian IP ASN.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini, adalah:

1. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan secara daring dan luring untuk meningkatkan kompetensi SDM Pusdatin;
2. Penataan Sumber Daya Manusia (SDM) KKP/pemetaan SDM berdasarkan Analisa Jabatan;
3. Memberikan motivasi tugas belajar/ijin belajar kepada pegawai Pusdatin;
4. Penertiban pengisian SKP;
5. Penertiban LHKPN/LHKSN dengan sosialisasi dari Biro SDMA;
6. Penentuan PIC untuk kelengkapan SKP dan LHKPN/LHKSN;
7. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis untuk Jabatan Fungsional lingkup Pusdatin, yaitu Pranata Komputer, Statistisi dan Surveyor Pemetaan serta mengidentifikasi Jabatan Fungsional Penata Perijinan di Denpasar pada Agustus 2024.

Sebagai tindaklanjut ke depan, agar IKU ini dapat tercapai, hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Menyelenggarakan pelatihan/Bimtek dan seminar secara daring secara kontinyu berdasarkan kompetensi dan kebutuhan;
2. Mengusulkan diklat fungsional untuk pejabat fungsional kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP;
3. Mengumpulkan dan menginput data dukung dari masing-masing pejabat dan pelaksana untuk meningkatkan nilai kompetensi SDM di lingkup Pusdatin;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur.

Gambar 25. Koordinasi Kolaborasi dan Evaluasi JF Prakom, Statistisi & Surta lingkup KKP

3.2.19 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Pusdatin merupakan penilaian terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Satker Pusdatin berdasarkan LHP yang disampaikan kepada Sekretariat Jenderal KKP pada tahun sebelumnya, yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh unit kerja yang menjadi objek pengawai.

Sedangkan cara pengukurannya yaitu jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti oleh Satker Pusdatin yang menjadi objek pengawasan sebanyak minimal 80% dari seluruh rekomendasi yang diberikan kepada Unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal KKP selama periode pengukuran pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan Memorandum Kepala Biro Keuangan Nomor Nomor 3663/SJ.2/RC.610/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024, perihal Capaian IKU "Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" Triwulan III Tahun 2024.

Realisasi capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal" periode Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 100,00% (telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 130 rekomendasi dari 130 rekomendasi). Pencapaian ini diperoleh berdasarkan atas Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal

oleh Unit Kerja Lingkup Setjen pada periode Triwulan II Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sampai dengan 30 Septembert 2024.

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Biro Perencanaan	10	10	100,00	0	00,00
2	Biro Keuangan	24	24	100,00	0	00,00
3	Biro Umum dan PBJ	38	38	100,00	0	00,00
4	Biro Hukum	0	0	100,00	0	00,00
5	Biro SDMAO	1	1	100,00	0	00,00
6	Biro Humas dan KLN	12	12	100,00	0	00,00
7	Pusdatin	11	11	100,00	0	00,00
8	LPMUKP	14	14	100,00	0	00,00
9	BPISDKP	20	20	100,00	0	00,00
TOTAL		**130**	**130**	**100,00**	**0**	**00,00**

Disampaikan bahwa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti (jumlah rekomendasi 11) telah tuntas ditindaklanjuti oleh Pusdatin, maka capaian indikator dilaporkan sesuai target yaitu 80% sehingga persentase capaian menjadi 100%.

Table 31. Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sasaran Kegiatan	**Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi**												
Nama IKU	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin**												
REALISASI						**2024**				**Renstra 2020-2024**			
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Target TW III**	**Realisasi**	**% Capaian TW III**	**% Kenaikan TW III 2023-2024**		**Target 2024**	**% Capaian Thdp Target 2024**	**Target 2025**	**% Capaian Thdp Target 2025**
100	**100**	**100**	**100**	**100**	**80**	**100**	**125**	**0**		**100**	**125**	**100**	**100**

Pada tabel diatas dapat dilihat realisasi IKU Persentase Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin pada Triwulan III ini adalah 100% dengan capaian 125%. Hal ini menunjukan bahwa realisasinya telah melebih target Triwulan III sebesar 80%, hal ini disebabkan karena semua

rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pusdatin sudah dilaksanakan.

Kegiatan yang telah ditindaklanjuti untuk pencapaian IKU ini adalah :

1. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan untuk penyelesaian dan tindaklanjut rekomendasi; dan
2. Memberikan data dukung rekomendasi dan saran hasil evaluasi/review dari Inspektorat Jenderal KKP.

3.2.20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengindentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari Unit Kerja Level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam sistem informasi Manajemen Pengetahuan.

Sejak Triwulan III Tahun 2023 terdapat perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan yang sudah mulai terintegrasi dalam *Portal Collaboration Office* pada laman https://portal.kkp.go.id, dimana Pejabat yang akan dinilai keaktifannya adalah Pejabat setingkat Eselon II karena belum semua unit kerja menetapkan Tim Kerja sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023. Dengan adanya perubahan penerapan Manajemen Pengetahuan ini maka terdapat perubahan penilaian komponen penilaian Manajemen Pengetahuan. Adapun komponen penilaian Manajemen Pengetahuan yang baru adalah :

1. Keaktifan 100%;
2. Maksimal nilai yang dapat diterima adalah 4; dan
3. Pegawai yang wajib dinilai adalah Eselon II.

Menindaklanjuti pengukuran capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 32. Target dan Realisasi IKU Manajemen Pengetahuan Lingkup Pusdatin Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Nama IKU	Persentase Unit Keja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
91,14	96,06	95,59	98,32	116,67	94	133,33	141,84	0	94	141,84	95	140,35

Pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen pada Triwulan III Tahun 2024 adalah 133,33%, yang menunjukan bahwa capaian sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 94%. Realisasi Manajemen Pengetahuan pada Triwulan III Tahun 2023 adalah 133,33, sehingga jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan III Tahun 2024 kenaikannya adalah 0%. Dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa capaian semua Unit Kerja lingkup Setjen adalah sama, yaitu 133,33%.

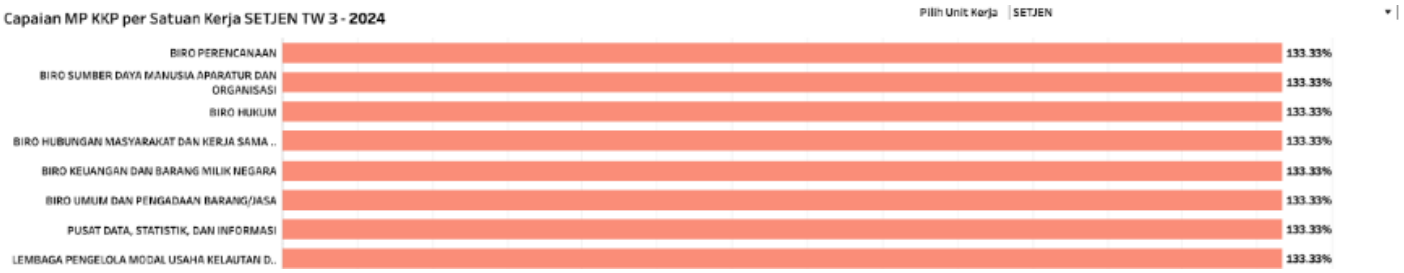

Gambar 26. Grafik Capaian Manajemen Pengetahuan per Satuan Kerja Pusdatin Triwulan III Tahun 2024

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka pemenuhan indikator kinerja Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin adalah :

1. *Monitoring Portal Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan; dan
2. Meningkatkan kinerja *Helpdesk Collaboration Office* Manajemen Pengetahuan.

3.2.21 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin

IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan capaian realisasi anggaran Pusdatin tahun 2024, dan merupakan hasil perhitungan capaian realisasi anggaran yang dibandingkan dengan pagu anggaran Pusdatin tahun 2024, yaitu 28,16% sampai dengan bulan September 2024.

Table 33. Target dan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi											
Nama IKU	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin											
Realisasi					2024				Renstra 2020-2024			
2019	2020	2021	2022	2023	Target TW III	Realisasi	% Capaian TW III	% Kenaikan TW III 2023-2024	Target 2024	% Capaian Thdp Target 2024	Target 2025	% Capaian Thdp Target 2025
-	-	-	99,45	99,15	-	-	-	-	95	-	96	-

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin merupakan indikator kinerja yang dihitung periode tahunan, sehingga pada Triwulan III Tahun 2024 belum ada data realisasi dan capaian yang dihasilkan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian IKU ini, adalah:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadual kegiatan yang telah ditetapkan;
2. Melakukan administrasi keuangan yang akuntabel dan tepat waktu disampaikan kepada Bendara Keuangan;
3. Melakukan pemantauan terhadap realisasi penyerapan anggaran;
4. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sebagai tindaklanjut ke depan, agar IKU ini dapat tercapai, hal-hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan sesuai dengan target pelaksanaan yang telah ditetapkan;
2. Mempercepat proses administrasi pertanggungjawaban keuangan; dan
3. Melakukan koordinasi dengan Biro Umum selaku pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

3.3 Realisasi Anggaran

Di tahun 2024 alokasi anggaran kegiatan Pusdatin dengan DIPA Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp 129.214.041.000,- Tahun 2024 terdapat 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Komunikasi,

Informasi Publik dan Umum (2328) dan Pengelolaan Data dan Informasi (2329). Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum (2328) dengan 2 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Umum dan (2) Layanan Perkantoran. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi (2329) masih menjadi kegiatan prioritas Pusdatin, dengan 3 Rincian Output (RO) yaitu (1) Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan; (2) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal; dan (3) Aplikasi Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan; dan terdapat kegiatan Prioritas Nasional dengan Rincian Output (RO) yaitu Sistem Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terintegrasi yang Operasional. Ke dua program tersebut masuk ke dalam Program Dukungan Manajemen. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan Automatic Adjusment (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai **Rp 26.198.710.000**,- atau sebesar **20,28%** dari total pagu anggaran.

Untuk lebih jelasnya alokasi pagu dan realisasi anggaran Pusdatin sampai dengan 30 September 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 34. Target dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Output Tahun 2024

Rincian Output (RO)	**Pagu (Rp)**	**Realisasi Anggaran**		**Sisa Anggaran per 30 September 2024 (Rp)**
		(Rp)	**(%)**	
Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum	59.545.516.000	21.350.183.810	36,53	37.095.332.190
Pengelolaan Data dan Informasi	69.668.525.000	8.052.377.434	18,52	35.417.437.566
TOTAL	**129.214.041.000**	**29.402.561.244**	**28,85**	**74.013.524.281**

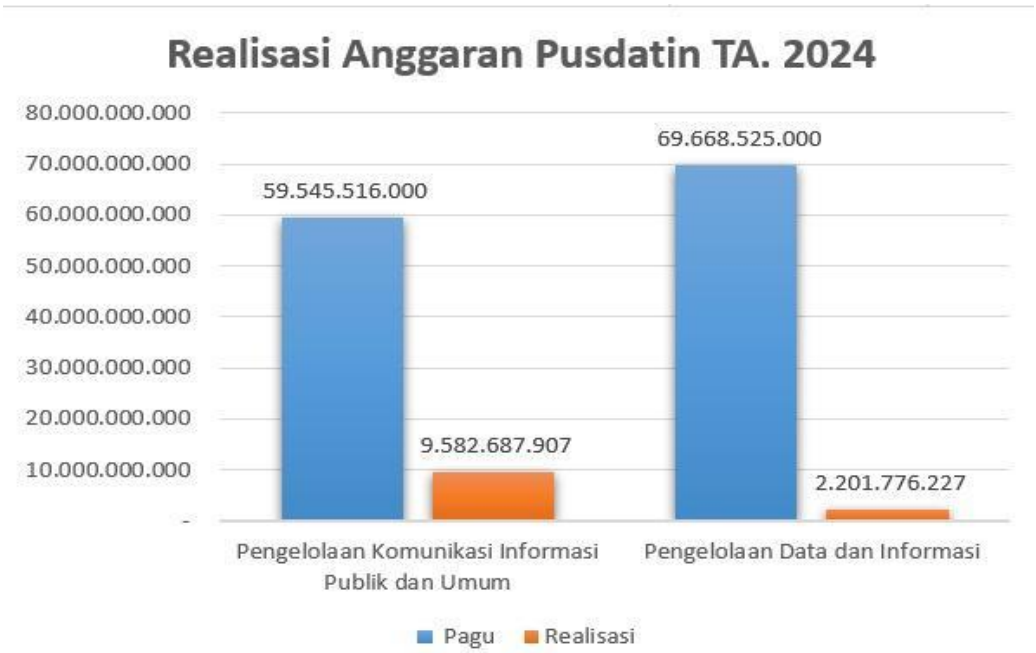

Gambar 27. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdatin Menurut Rincian Ouput

BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada tahun 2024 Pusdatin memiliki 2 Sasaran Kegiatan dan 21 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan turunan dari tugas, pokok, dan fungsi Pusdatin. Dari 21 Indikator Kinerja terdapat 6 indikator yang capaiannya dinilai secara triwulan, 2 indikator yang dinilai secara semesteran, dan 15 indikator yang dinilai secara tahunan.

Capaian kinerja Pusat Data, Statistik dan Informasi pada Triwulan III Tahun 2024 berdasarkan aplikasi Kinerjaku, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pencapaian Kinerja Pusdatin Triwulan III Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Nilai Kinerja Organisasi Pusdatin pada aplikasi Kinerjaku di Triwulan III Tahun 2024 adalah **116,17**.
2. Terdapat 4 Indikator Kinerja yang penghitungannya dilakukan secara triwulan, dan 2 Indikator Kinerja yang penghitungannya dilakukan secara tahunan yaitu :
   a. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Setjen **(capaian : 141,84%)**;
   b. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP **(capaian : 106,29%)**;
   c. Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP **(capaian : 136%)**;
   d. Survei Kepuasan Masyarakat KKP **(capaian : 103,67%)**;
   e. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin **(capaian : 125%)**;
   f. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Pusdatin **(capaian : 141,84%).**

3. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan *Automatic Adjusment* (AA) Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusdatin melakukan AA senilai Rp 26.198.710.000,- atau sebesar 20,28% dari total pagu anggaran.
4. Realisasi Penyerapan DIPA Pusdatin per 30 September tahun 2024 berdasarkan aplikasi SAKTI dari pagu senilai **Rp 129.214.041.000,-** telah direalisasikan senilai **Rp 29.013.911.889,-** dengan persentase realisasi anggaran adalah sebesar **28,16%,** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 74.013.524.281**,

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan analisis capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja pada triwulan berikutnya. Beberapa tindak lanjut yang harus dilakukan yaitu :

1. Melakukan pemantauan terhadap indikator kinerja pada triwulan berikutnya agar realisasi dan capaian dapat melebihi target yang telah ditetapkan;
2. Melakukan monitoring terhadap seluruh progress IKU sesuai dengan periode pengukurannya, baik tahunan, semesteran dan triwulanan;
3. Meningkatkan penyerapan anggaran dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Pusdatin 2024

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAN www.kkp.go.id SUREL setjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aulia Riza Farhan**

Jabatan : Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudy Heriyanto Adi Nugroho**

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Sekretaris Jenderal	Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
Rudy Heriyanto Adi Nugroho	**Aulia Riza Farhan**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PUSAT DATA STATISTIK DAN INFORMASI

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	1.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Kelautan dan Perikanan (persen)	91
		2.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Setjen (persen)	94
		3.	Indeks Layanan Aplikasi Sistem Informasi (indeks)	3,5
		4.	Persentase Layanan Sistem Informasi Pusat Kontrol Maritim (persen)	76
		5.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KKP (indeks)	3,05
		6.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP (nilai)	76
		7.	Persentase Pemenuhan Data Citra Satelit dan Informasi Geospasial Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Terpenuhi (persen)	76
		8.	Tingkat Kematangan Keamanan Siber KKP (indeks)	2,5
		9.	Tingkat Maturitas Satu Data Kelautan dan Perikanan (Persen)	70
		10.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE KKP (nilai)	3
		11.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral KKP (nilai)	2,75
		12.	Indeks Pelayanan Publik KKP (indeks)	4,59
		13.	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik KKP (nilai)	85
		14.	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) KKP (nilai)	88,30
2.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	15.	Penilaian Mandiri SAKIP Pusdatin (nilai)	84
		16.	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP (persen)	100
		17.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Pusdatin (persen)	100
		18.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pusdatin (indeks)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pusdatin (persen)	80
		20.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pusdatin (persen)	94
		21.	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Pusdatin (persen)	95

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	**Pengelolaan Data dan Informasi**	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di bidang Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	62.474.420.000
2.	**Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik, dan Umum**	
	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Pusat Data, Statistik, dan Informasi	67.675.001.000
Total Anggaran Pusat Data Statistik dan Informasi Tahun 2024		**130.149.421.000**

Jakarta, 15 Januari 2024

Pihak Kedua
Sekretaris Jenderal

Rudy Heriyanto Adi Nugroho

Pihak Pertama
Kepala Pusat Data, Statistik,
dan Informasi

Aulia Riza Farhan

PUSAT DATA, STATISTIK, DAN INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN